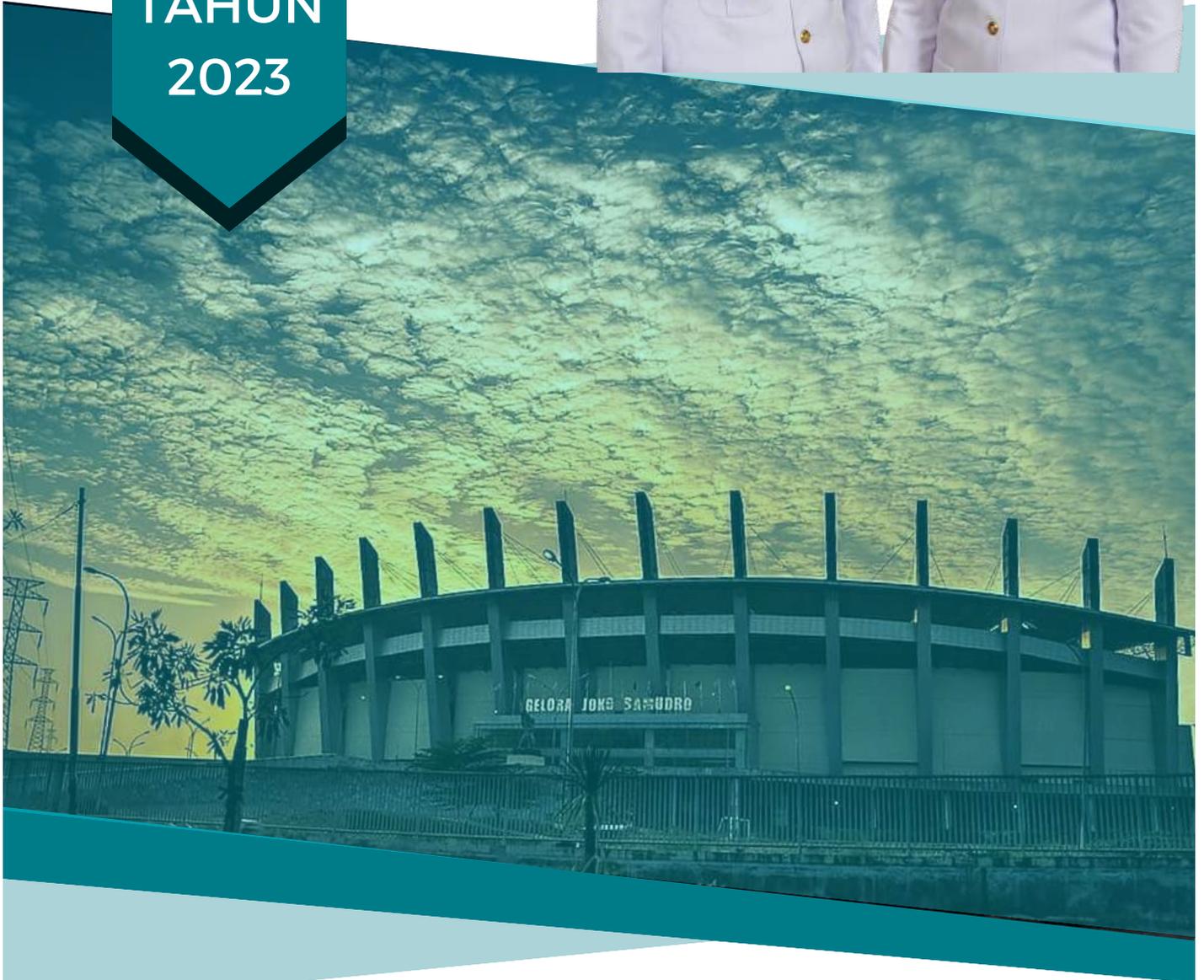




Kabupaten
GRESIK



TAHUN
2023



LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah pusat adalah cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga laporan penerapan SPM merupakan salah satu bahan rujukan dan evaluasi proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal. Selain itu Laporan SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan oleh masyarakat. Pada akhirnya Standar Pelayanan Minimal menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan sampai penyusunan laporan ini. Kami juga menyadari masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran membangun dalam penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.

Gresik, Maret 2024

 **BUPATI GRESIK**
H. FANDI AKHMAD YANI, SE



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kebijakan Umum	4
D. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	13
1. Urusan Pendidikan	17
2. Urusan Kesehatan	18
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22
4. Urusan Trantibumlinmas	24
5. Urusan Sosial	28
BAB II PENERAPAN SPM.....	29
A. SPM Urusan Pendidikan	29
1. Pengumpulan Data	29
2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	30
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	30
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	31
B. SPM Urusan Kesehatan	31
1. Pengumpulan Data	32
2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	34
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	35
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	35
C. SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	36
1. Pengumpulan Data	36
2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	37
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	37



4.	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	38
D.	SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	38
1.	Pengumpulan Data.....	38
2.	Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	39
3.	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	40
4.	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	40
E.	SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	41
	Bidang Trantibum	41
1.	Pengumpulan Data.....	41
2.	Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	41
3.	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	41
4.	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	42
	<i>Bidang Kebencanaan</i>	42
1.	Pengumpulan Data.....	42
2.	Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	44
3.	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	45
4.	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	46
	Bidang Pemadam Kebakaran	46
1.	Pengumpulan Data.....	46
2.	Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	47
3.	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	47
4.	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	47
F.	SPM Urusan Sosial.....	47
1.	Pengumpulan Data.....	47
2.	Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	48
3.	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	49
4.	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.....	49
BAB III	PENCAPAIAN SPM.....	51
A.	SPM Bidang Urusan Pendidikan.....	51
1.	Jenis Pelayanan Dasar	51



2.	Target Pencapaian SPM	51
3.	Anggaran	56
4.	Dukungan Personil	60
5.	Hasil Capaian	61
6.	Permasalahan dan Solusi	67
B.	SPM Bidang Urusan Kesehatan	68
1.	Jenis Pelayanan Dasar	68
2.	Target Pencapaian SPM	70
3.	Anggaran	87
4.	Dukungan Personil	89
5.	Hasil Capaian	93
6.	Permasalahan dan Solusi	109
C.	SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	112
1.	Jenis Pelayanan Dasar	112
2.	Target Pencapaian SPM	112
3.	Anggaran	115
4.	Dukungan Personil	116
5.	Hasil Capaian	118
6.	Permasalahan dan Solusi	122
D.	SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	123
1.	Jenis Pelayanan Dasar	124
2.	Target Pencapaian SPM	124
3.	Anggaran	126
4.	Dukungan Personil	127
5.	Hasil Capaian	128
6.	Permasalahan dan Solusi	130
E.	SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	133
1.	Jenis Pelayanan Dasar	133
2.	Target Pencapaian SPM	134
3.	Anggaran	139



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

4. Dukungan Personil.....	142
5. Hasil Capaian	146
6. Permasalahan dan Solusi.....	153
F. SPM Bidang Urusan Sosial	156
1. Jenis Pelayanan Dasar	156
2. Target Pencapaian SPM	156
3. Anggaran.....	162
4. Dukungan Personil.....	163
5. Hasil Capaian	165
6. Permasalahan dan Solusi.....	166
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	168
BAB V PENUTUP.....	182
LAMPIRAN.....	185
SK TIM PENERAPAN SPM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023.....	186



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis serta mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh suatu badan layanan umum terhadap masyarakat. Diharapkan pelaksanaan SPM dapat menjamin kualitas dan kuantitas minimal dari suatu pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat, sehingga diharapkan dapat meratanya pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan menghindari kesenjangan. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disebutkan dalam undang-undang pemerintah daerah meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Sosial

Seperti halnya dengan instansi pemerintah di pusat dan di daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Gresik juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM



yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, yang diganti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan



- Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021;
 18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021;



19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

C. Kebijakan Umum

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra OPD.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Gresik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 menetapkan Visi, Misi, Motto, Strategi dan Arah Kebijakan daerah serta Prioritas Daerah sebagai berikut :

1. Visi Kabupaten Gresik

Visi Kabupaten Gresik merupakan cita-cita luhur untuk melangkah membangun Gresik sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 yaitu:

” Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”.

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagaimana berikut:



Tabel I.C.1. Pokok - Pokok Visi Pembangunan Kabupaten Gresik

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Gresik yang lebih mandiri | Pemerintah Kabupaten Gresik dan masyarakatnya secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah. |
| 2. Gresik yang sejahtera | Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial. |
| 3. Gresik yang berdaya saing | Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya |



saing sebuah daerah. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan Pulau Bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GERBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

- 4. Gresik yang berkemajuan** Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki



karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

- 5. Gresik yang berlandaskan akhlakul karimah** Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.



2. Misi Kabupaten Gresik

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021-2026 adalah:

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota;

Misi ke-3

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;

Misi ke-4

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah;

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan berlandaskan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023 yaitu *Percepatan transformasi ekonomi inklusif dan pemulihan sosial menuju Gresik baru*.

Prioritas Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023, 9 (sembilan) prioritas tematik, prioritas program pembangunan, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan operasional antara lain Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah, dan dokumen Rencana Aksi Daerah antara lain Masterplan Gresik *Smart City*, Rencana Aksi Peduli HAM, dan sebagainya. Prioritas kegiatan dimaknai sebagai



keluaran kegiatan prioritas yang dilaksanakan untuk menunjang sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Prioritas Kegiatan Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan sebagaimana berikut:

No	Prioritas Tematik	Kegiatan
1.	Gresik Akas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan <i>Smart Governance</i> berbasis satu data pembangunan	1. Pengembangan Gresik <i>Inclusive Decision Support System</i> 2021-2026; 2. Pengembangan <i>Single Platform</i> Gresikpedia; 3. Pengembangan forum kemitraan Pentahelix (Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan tinggi, dan Masyarakat/Pesantren) Gresik Rembug Akur ; 4. Penguatan sistem informasi keuangan Desa; 5. Penguatan Lapor SP4N hingga ke tingkat RT-RW (Gresik Siap)
2.	Gresik Seger Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	6. Pengembangan Program pengentasan kemiskinan berbasis ketunggalan identitas; 7. Pengembangan PKH Inklusif; 8. Advokasi pekerja migran asal Gresik; 9. Perluasan jaminan sosial kehormatan Gresik Santri; 10. Pengembangan bantuan usaha produktif untuk usaha kepala rumah tangga perempuan; 11. Penanganan PMKS terpadu;
3.	Gresik Mapan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	12. Pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul dan Retarsing



No	Prioritas Tematik	Kegiatan
		Bazin penanggulangan Banjir Kali Lamong; 13. Pembangunan <i>Smart Branding</i> melalui penataan taman kota tematik 14. Peningkatan dan pemerataan kebermanfaatan alokasi anggaran Desa untuk pembangunan Dusun atau Gresik membangun Dusun (Gerbang Dusun); 15. Peningkatan konektivitas moda transportasi perkotaan dan perdesaan Kabupaten Gresik; 16. Pembangunan <i>Command Center</i> ;
4.	Gresik Agropolitan Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan	17. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian untuk buruh tani melalui pengembangan kartu Gotani; 18. Peningkatan pemasaran produk pertanian melalui kolaborasi kelompok tani, Bumdes, pasar Desa, dan pelaku usaha; 19. Pengembangan teknopark berbasis agropolitan dan minapolitan;
5.	Gema Karya Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi	20. Pengembangan creative hub berbasis komunitas millennial; 21. Peningkatan kapasitas tenaga kerja berbasis demand driven; 22. Pengembangan hibah produktif untuk rintisan usaha sebanyak 1.000 start up; 23. Penguatan keberpihakan terhadap produk asli gresik melalui akses



No	Prioritas Tematik	Kegiatan
		permodalan, penguatan branding, dan pemasaran. 24. Penguatan kapasitas kepemudaan dan pengembangan olahraga prestasi; 25. Pengembangan holding bumdes untuk usaha produktif; 26. Peningkatan perekonomian Desa <i>One village One Product</i> . 27. Peningkatan potensi pendapatan Daerah melalui pengembangan proyek strategis berbasis KPBU; 28. Peningkatan kualitas, kesederhanaan, dan kemudahan pelayanan perizinan 29. Penguatan perekonomian pesantren <i>One Pesantren One Product</i>
6.	Gresik Cerdas Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;	30. Pengembangan insentif pendidikan untuk peserta didik dan tenaga pendidikan; 31. Pemberian beasiswa Sarjana untuk yatim dan/atau piatu, Huffadz, dan Penyandang disabilitas; 32. Peningkatan kualitas dan akses pembiayaan untuk suprastruktur dan infrastruktur pendidikan;
7.	Gresik Sehati Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	33. Pengembangan perlindungan perempuan dan anak melalui pembiayaan layanan kesehatan dan medicolegal; 34. Penguatan jaminan kesehatan menuju <i>universal health coverage</i> dan pelayanan gratis untuk keluarga tidak sejahtera.



No	Prioritas Tematik	Kegiatan
		35. Penguatan fasilitas dna sumber daya manusia kesehatan di Rumah Sakit Oemar Mas' oed; 36. Pembangunan rumah sakit di Gresik wilayah selatan; 37. Peningkatan capaian akta kelahiran untuk usia o-18 tahun didukung integrasi dengan pelayanan persalinan fasilitas kesehatan;
8.	Gresik Barokah Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	38. Pengembangan pendidikan berkarakter yang agamis berbasis keluhuran budaya Gresik; 39. Pengembangan strategi pengarustamaan keluhuran Gresik yang agamis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 40. Peningkatan keterlibatan peran serta tokoh agama dan kebudayaan dalam meningkatkan konudisifitas Gresik 41. Pemberantasan narkoba dan pencegahan HIV-AIDs
9.	Gresik Lestari Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan	42. Pengembangan Wisata Desa berbasis ekowisata; 43. Perlindungan dan Pengembangan kawasan esensial; 44. Revitalisasi Gresik Kota Pusaka (Wisata Heritage); 45. Penegakan Kepatuhan Perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup; 46. Pembangunan TPA, TPST dan TPS3R serta penguatan kelembagaan Bank Sampah;



D. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam perumusan Perencanaan Jangka Menengah ini pendekatan yang digunakan adalah Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Berdasarkan penelaahan maka strategi pembangunan Kabupaten Gresik periode 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel I.D. 1 Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Visi : Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah		
Misi I "Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif"		
Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui open dan smart government



Misi II “Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota”

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.2 Meningkatkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	S3. Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan

Misi III “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah”

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.3 Terwujudnya pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya eco industry



Misi IV “Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah”

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	S7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan S8. Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas berakhlakul karimah, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan

Misi V “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik”

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.5 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	S.9. Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja



Arah Kebijakan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Berikut arah kebijakan Tahun 2023 dan tematik pembangunannya:

Tabel I.D. 2. Arah Kebijakan

TAHUN	ARAH KEBIJAKAN	TEMATIK PEMBANGUNAN
2023	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Penguatan Sumber daya Manusia yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakul karimah
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	

Strategi dan Arah Kebijakan Urusan Pelayanan Dasar

Tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing – masing urusan pelayanan dasar disampaikan dalam rumusan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:



1. Urusan Pendidikan

Dalam menjawab tantangan pendidikan di era 2024, Pemerintah Kabupaten Gresik mengarahkan kebijakan pelaksanaan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan untuk mengatasi isu-isu penting di bidang pendidikan. Isu utama yang dihadapi adalah rendahnya rata-rata lama sekolah. Untuk mengatasi hal ini, strategi yang dirumuskan meliputi:

1. **Peningkatan Kualitas Pembelajaran:** Termasuk di dalamnya adalah :
 - a) Peningkatan akses pendidikan yang inklusif, menyediakan layanan pendidikan yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal
 - b) Perlindungan finansial bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui insentif dan bantuan
2. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran:** Fokus pada :
 - a) Menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan yang merata di setiap wilayah kecamatan
 - b) Memastikan ketersediaan dan kelengkapan alat pembelajaran yang memadai di kelas
 - c) Menyediakan alat permainan dan peraga untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif
3. **Pemerataan Kesejahteraan Tenaga Pendidik:** Menyusun strategi untuk distribusi kesejahteraan yang lebih merata bagi tenaga pendidik, termasuk tenaga pengajar honorer.
4. **Pengembangan Bahan Ajar:** Menyediakan bahan ajar yang relevan dengan era globalisasi dan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Program-program prioritas yang dilaksanakan mencakup pengelolaan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal, dengan fokus pada peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dengan strategi ini, Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk menghadapi tantangan pendidikan saat ini dan mendatang, memastikan semua warga Gresik mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.



2. Urusan Kesehatan

Guna mewujudkan Misi Ke - 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu:

"Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah"

serta Tujuan ke - 1 (satu) yakni *"Menguatkan Pembangunan Manusia Gresik Baru yang Berkualitas dan Berkeadilan Berlandaskan Akhlakul Karimah"* juga Sasaran ke - 1 (satu) yakni *"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dan Kesehatan"*, maka tujuan pembangunan pada urusan kesehatan adalah:

"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan"

Makna dari tujuan tersebut adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak, meningkatkan status gizinya dan mengendalikan penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan sumber daya kesehatan dalam bentuk mutu pelayanan.

Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil program organisasi urusan kesehatan adalah:

a. Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan di bidang kesehatan masyarakat.
2. Dengan adanya dukungan praktisi di bidang kesehatan, diharapkan mampu mengoptimalkan kegiatan promosi di bidang kesehatan.
3. Kader - kader posyandu dapat menjadi garda terdepan dalam bidang kesehatan terutama dalam hal promotif dan preventif.
4. Mendorong optimalisasi SIK (Sistem Informasi Kesehatan) dengan adanya dukungan APBD.
5. Pihak puskesmas harus memiliki komitmen yang kuat dalam hal program kabupaten/kota sehat.



6. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, dengan usaha optimal oleh tim Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam melayan masyarakat, diharapkan indikator SPM dapat tercapai dengan baik.
 7. Dengan tersedianya sanitasi dan kesling kit, diharapkan dapat memaksimalkan kualitas sanitasi lingkungan terutama kualitas air bersih di beberapa tempat.
 8. Lebih mengoptimalkan kegiatan di posyandu supaya tingkat minat masyarakat terhadap pelaksanaan posyandu meningkat.
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan
1. Mendorong peningkatan kualitas fasyankes melalui penyusunan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, pelibatan masyarakat, sistem pengaduan dan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan fleksibilitas penggunaan anggaran
 2. Meningkatkan pembiayaan KGS, memperbaiki sistem pendistribusian kartu dan memperbaiki prosedur dengan instansi terkait
 3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan di fasyankes secara berkala dan pembinaan melalui visitasi perijinan fasyankes
 4. Mendorong Puskesmas untuk menjadi BLUD agar dapat memenuhi rasio Dokter
 5. Memfasilitasi penambahan Puskesmas baru dalam hal perijinan dan pemenuhan standar
 6. Mendorong dan memfasilitasi klinik swasta untuk melaksanakan akreditasi
 7. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dan memfasilitasi pemenuhan standar Pustu
 8. Menyusun perencanaan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pendirian RS Selatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah Gresik Selatan
 9. Menyediakan layanan call center untuk pusat informasi kesehatan, menyediakan media pengaduan dan penyusunan SOP



pengaduan masyarakat serta membangun komunikasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan faskes dalam rangka meminimalkan keluhan masyarakat.

10. Mendorong Puskesmas dan Rumah Sakit untuk bersaing dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka kebiasaan baru agar tetap memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat dan mengacu pada keselamatan pasien.
11. Mendorong puskesmas untuk mengoptimalkan angka kontak melalui pemanfaatan layanan jarak jauh dan digitalisasi layanan.
12. Mendorong puskesmas mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
13. Memfasilitasi klinik swasta untuk melaksanakan akreditasi dan meningkatkan pembinaan bersamalintas sektor bidang perijinan.
14. Memfasilitasi Pelatihan Pelayanan Kesehatan Tradisional bagi Programmer Puskesmas sehingga dapat memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

c. Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan di bidang sumber daya kesehatan
2. Pengadaan jenis tenaga kesehatan yang belum terfasilitasi di beberapa puskesmas.
3. Memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan sarana prasarana menggunakan LPSE sehingga memudahkan pengadaan secara online.
4. Melakukan sosialisasi OSS RBA supaya UMKM dapat lebih mudah mengurus perijinan.
5. Memaksimalkan penggunaan anggaran DAK dari POM untuk pengawasan obat dan makanan.



6. Mengoptimalkan regulasi penataan tenaga kesehatan dan komitmen pemerintah daerah terhadap daya saing tenaga kesehatan yang terus meningkat.
 7. Memaksimalkan dukungan anggaran dari berbagai sumber untuk pemenuhan alat kesehatan di era globalisasi yang membutuhkan alat kesehatan dengan teknologi tinggi.
 8. Menguatkan pengawasan mutu dan pengawasan obat dan makanan.
 9. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan yang telah dimiliki dan merekrut tenaga kesehatan yang belum dimiliki oleh Dinas Kesehatan sesuai yang dipersyaratkan oleh Kemenkes.
 10. Memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan sarana prasarana menggunakan LPSE sehingga memudahkan pengadaan secara online.
 11. Lebih menguatkan pengawasan obat dan makanan supaya tidak terjadi peredaran obat ilegal.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. Melaksanakan sosialisasipentingnya penerapan SistemKewaspadaan Dini dan Responkegiatan Surveilans penyakitpotensi KLB/wabah/pandemi diMasyarakat.
 2. Melaksanakan sosialisasipentingnya skrining faktor resikoPTM bagi Masyarakat usiaproduktif di setiap Kecamatandengan melibatkan lintas sectoral.
 3. Peningkatan kompetensi bagipetugas Surveilans melaluipemberian pelatihan SurveilansKesehatan secara berkala dansesuai isu penyakit PD3I danpenyakit infeksi emerging (PIE) yangsedang terjadi di masyarakat dalamskala KLB, wabah dan pandemi,
 4. Mengadakan pelatihan PosbinduPTM dan Sistem InformasiPelaporan PTM (SIPTM) bagipenanggung jawab PTM Puskesmas.
 5. Meningkatkan kompetensipetugas Surveilans denganpemberian pelatihan SurveilansKesehatan secara berkala dansesuai isu



penyakit PD3I dan penyakit infeksi emerging (PIE) yang sedang terjadi dimasyarakat dalam skala KLB, wabah dan pandemi.

6. Meningkatkan kualitas Kader Posbindu PTM dengan pemberian pelatihan PTM secara berkala.
7. Memberikan feed back berkala pencapaian penemuan kasus penyakit PD3I dan penyakit infeksi emerging (PIE) yang sedang terjadi di masyarakat dalam skala KLB, wabah dan pandemi kepada Puskesmas.
8. Melaksanakan Workshop PTM dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta kompetensi penganggung jawab PTM Puskesmas maupun Kader Posbindu PTM.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Strategi dan arah kebijakan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang di laksanakan oleh Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pada visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”.

Visi tersebut diwujudkan melalui Nawa Karsa yang merupakan 9 (Sembilan) pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Kabupaten Gresik menjadi lebih sejahtera dan semangat baru. Nawa Karsa merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan. Kesembilan Karsa tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Mengacu pada Misi II:



“Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota” dan strategi Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan

Arah kebijakan dan strategi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021 - 2026 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Dinas CKPKP, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan Provinsi, Kementrian dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sector serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan jumlah SDM dimaksimalkan guna mendukung komitmen Pemerintah untuk pemenuhan sarana prasarana permukiman
2. Meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung komitmen Pemerintah untuk pemenuhan sarana prasarana permukiman
3. Ketersediaan SOP dan aplikasi berbasis TIK untuk mendukung administrasi pemerintahan
4. Ketersediaan jumlah SDM dimaksimalkan guna mendukung komitmen Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas/ prasarana kedinasan
5. Meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung komitmen Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas/ prasarana kedinasan
6. Ketersediaan jumlah SDM dan adanya kewenangan dalam proses penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) dioptimalkan dalam mendukung penanganan kawasan permukiman
7. Ketersediaan SOP untuk administrasi pemerintahan digunakan untuk menekan resistensi masyarakat terhadap program pemerintah



4. Urusan Trantibumlinmas *Bidang Trantib*

Pelaksana kegiatan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Trantib di Kabupaten Gresik adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk mewujudkan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel I.D. 3. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Trantib
(Satuan Polisi Pamong Praja)

- Visi : Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.
- Misi 4 : Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan toleransi dalam masyarakat	1. Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Meningkatkan penegakan PERDA di Kabupaten Gresik b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi PERDA c. Meningkatkan kapasitas SDM dengan bintek tentang PERDA dan PERKADA d. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada dalam upaya penegakan PERDA	Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran Perda
	2. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat	a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Desa dan Linmas; b. Pembentukan jejaring Linmas; c. Melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat;	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Bidang Kebencanaan

Urusan trantibumlinmas bidang kebencanaan di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah



(BPBD). Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah Pelaksana urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar SPM yang disesuaikan dengan Visi Misi Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Adapun Visi BPBD Kabupaten Gresik adalah: *‘Terwujudnya Penanggulangan Bencana secara Cepat, Tepat, Tangguh dan Menyeluruh’*. Sedangkan Misi yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Gresik adalah :

1. Meningkatkan keterpaduan aparatur pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan publik dibidang penanggulangan bencana.

Arah kebijakan pembangunan daerah pada BPBD Kabupaten Gresik berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang berkaitan dengan pelayanandasar urusan Trantibumlinmas bidang Kebencanaan terdiri atas Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelayanan Penyelematan dan evakuasi Korban Bencana.

Bidang Pemadam Kebakaran

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Pemerintahan Kabupaten Gresik, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Strategi ini untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tingkat waktu tanggap (*Response Time*) yang belum tercapai;



2. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang mendukung;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran;
5. Mengoptimalkan Pengujian dan Pemeriksaan Alat-alat Proteksi Bangunan dan Gedung;
6. Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi terkait Pengaduan Kebakaran;
7. Mengoptimalkan Pembentukan Tim Balakar.

Arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya, meliputi hal – hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Mitigasi Bencana Kebakaran;
2. Revitalisasi dan membuat peta lokasi rawan kebakaran;
3. Membangun Jumlah pos pemadam kebakaran sesuai dengan luas Kabupaten Gresik;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan layanan pemerintah daerah;
5. Terkualifikasinya Aparatur melalui Diklat Internal maupun Eksternal;
6. Penyediaan Sistem Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran Berbasis Wilayah;
7. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran;
8. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Alat Proteksi Kebakaran;
9. Pengembangan Sistem Informasi TIK untuk Penanganan Bencana.

Tabel I.D. 4. Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pemadam Kebakaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pembangunan	1. Meningkatnya kinerja	1. Membangun dan memelihara	1. Terkualifikasinya Aparatur melalui Diklat



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik	sarana dan prasarana yang mendukung 2. Meningkatkan Pemahaman kpd masyarakat akan pentingnya pencegahan dan resiko kebakaran secara mandiri 3. Mengoptimalkan Pembentukan Tim Balakar	Internal maupun Eksternal 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan layanan pemerintah daerah 3. Membangun/ Penambahan Jumlah pos pemadam kebakaran sesuai dengan luas Kabupaten Gresik
	2. Menurunnya Angka Kejadian Kebakaran	1. Meningkatkan pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran 2. Mengoptimalkan Pengujian dan Pemeriksaan Alat-alat Proteksi Bangunan dan Gedung 3. Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi terkait Pengaduan Kebakaran 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat 2. Peran serta aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pencegahan bahaya kebakaran 3. Penyediaan Sistem Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran Berbasis Wilayah 4. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran 5. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Alat Proteksi Kebakaran 6. Pengembangan Sistem Informasi TIK untuk Penanganan Bencana



5. Urusan Sosial

Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka penerapan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial tertuang pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026. Penerapan SPM Bidang Sosial untuk Tahun Anggaran 2023 meliputi Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana. Strategi yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM adalah pengembangan mutu, kualitas dan kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dan mengoptimalkan fungsi sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan kelembagaan sosial bagi peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatkan verivali data guna pemberian bantuan sosial tepat sasaran.

Sedangkan Arah Kebijakan yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM adalah memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Kelembagaan Sosial melalui pengembangan mutu dan kemampuan SDM, optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan, pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan verivali data dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.



BAB II PENERAPAN SPM

A. SPM Urusan Pendidikan

1. Pengumpulan Data

SPM urusan pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan melakukan pengumpulan data meliputi :

1. Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya;
2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
3. Jumlah dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia.

Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratur persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun. Hasil perhitungan data selanjutnya diintegrasikan dengan Sistem Informasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahapan pengumpulan data terdapat beberapa format yang telah disediakan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut:

1. Form 1.A.2 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi.
2. Form 1.A.4 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Form 1.A.7 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar.
4. Form 1.A.9 Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar : Literasi dan Numerasi.
5. Form 1.A.11 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Form 1.A.12 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar.
(format terlampir)



2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pada urusan pendidikan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dinas Pendidikan melaksanakan perhitungan warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya dalam rangka memenuhi prioritas SPM. Warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu dikarenakan:

1. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
3. Kondisi bencana; dan/atau
4. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pada tahapan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, terdapat format yang telah disediakan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 berupa Form 1.B.2 Perhitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Langkah ketiga yang dilakukan pada SPM urusan Pendidikan adalah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja



penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dari itu perhitungan yang dimuat kedalam Renstra dan Renja disusun dengan memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, terdapat format yang telah disediakan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 berupa Form 1.C.2 Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan dan Kerangka Pendanaan.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/ atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan berpedoman pada standar teknis SPM dan/ atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara dapat dilakukan dengan :

1. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
2. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/ atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, terdapat format yang telah disediakan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 berupa Form 1.D.2 Realisasi Pemenuhan SPM Pendidikan

B. SPM Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, secara substansial



keberadaan SPM ini berada dalam wilayah hukum, khususnya Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara. Tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Kesehatan terdiri dari 4 (empat) tahap yang meliputi:

1. Pengumpulan Data

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) urusan kesehatan, melalui beberapa tahapan pengumpulan data yang meliputi:

a. Menentukan sasaran atau target masing-masing indikator.

Penentuan sasaran atau target SPM dilakukan berdasarkan hasil data sasaran proyeksi penduduk di Kabupaten Gresik Tahun 2023 menurut usia maupun umur tunggal per Puskesmas setempat yang diperoleh dari Provinsi Jawa Timur.

Setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memperoleh sasaran proyeksi dari Dinkes Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar (SPM), selanjutnya masing-masing pemegang program Dinas Kesehatan menganalisis sasaran pada tiap indikator Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas.

Puskesmas yang telah mendapatkan data sasaran dari Dinas Kesehatan selanjutnya melakukan mapping target pada tiap-tiap Desa/Kelurahan yang merupakan wilayah kerja Puskesmas tersebut sesuai dengan data sasaran proyeksi yang diperoleh. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten menuangkan sasaran atau target penduduk yang mendapatkan pelayanan Kesehatan seperti halnya pada Form 2.A.2 (Rekapitulasi Penduduk untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar).



b. Mengidentifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Gresik

Dalam mendukung upaya pelayanan Kesehatan dukungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga berpengaruh dalam pencapaian penerapan pemenuhan pelayanan dasar (SPM). Diketahui bahwa Kabupaten Gresik mempunyai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meliputi 32 Puskesmas yang tersebar dalam 18 Kecamatan. Selain itu Kabupaten Gresik memiliki 21 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang terdiri dari 2 (dua) RS milik Pemerintah Kabupaten Gresik dan 19 lainnya merupakan kepemilikan Swasta.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang penting untuk diperhatikan implementasinya adalah SPM di bidang kesehatan khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Dalam pemenuhan pemenuhan pelayanan dasar, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan ketentuan tentang Jenis dan Mutu pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan semua daerah. Salah satu tujuan SPM untuk menjamin pelayanan dasar bagi seluruh warga negara yang menjadi hak dan wajib dipenuhi.



Selain fasilitas pelayanan Kesehatan, sumber daya manusia juga berperan penting dalam mendukung pencapaian SPM. Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di masing-masing puskesmas disesuaikan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja di masing-masing Puskesmas yang meliputi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli gizi, penyuluh Kesehatan, dan pranata laborat dalam mendukung pemenuhan pelayanan dasar di Kabupaten Gresik.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar pada masing-masing indikator SPM Urusan Kesehatan tahun 2023 berdasarkan data sasaran pada masing-masing indikator. Seperti halnya Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, Dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik yang didasarkan pada target sasaran sebagai dasar jumlah kebutuhan dan yang masih tersedia. Hal ini digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan anggaran untuk pemenuhan SPM. Meskipun demikian dalam hal perhitungan kebutuhan alat Kesehatan, Bahan Medis Habis pakai, obat, vaksin dan perlengkapan pelayanan Kesehatan dasar lainnya memiliki jenis, merk yang bervariasi pada setiap pengadaan barang dan sedikit mengalami kesulitan dalam menghitung item pemenuhan pelayanan dasar tersebut.

Selain kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, Dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan. Perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan pada masing-masing indikator SPM juga mendapat perhatian. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan yang mengacu pada Analisis jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Meskipun demikian dalam pelaksanaan perhitungan penyusunan kebutuhan SDM Kesehatan terkait SPM Tahun 2023 masih terbatas pada ketersediaan saja.



3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Dalam rangka memperoleh capaian kinerja standar pelayanan minimal Kesehatan yang berkualitas dan memenuhi target setiap tahunnya, maka diperlukan penyusunan rencana pemenuhan dasar yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Adapun perhitungan kebutuhan anggaran disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan anggaran terkait pendukung SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Gresik. Selain itu, dasar perhitungan anggaran juga berdasarkan kondisi kinerja tahun 2020 yang merupakan kinerja awal tahun. Adapun kegiatan pendukung kegiatan pelayanan dasar yaitu Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 12 indikator kinerja program (outcome) pendukung SPM.

Selain tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar juga terintegrasi dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Renstra tersebut menjelaskan terkait 12 Sub kegiatan yang mendukung 12 indikator pendukung SPM yang dalam penyusunannya didasarkan pada Analisa kebutuhan pendukung SPM, strategi pencapaian hingga kebutuhan anggaran pada setiap tahunnya.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Urusan Kesehatan digunakan sebagai dasar untuk menerapkan standar pelayanan minimal. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagai Organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan. Berikut ini merupakan Ringkasan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gresik Urusan Kesehatan tahun 2023.



Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang dapat menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK. Implementasi SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik Sebagian besar didukung oleh sumber anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Diketahui bahwa secara umum dari capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023 di Kabupaten Gresik tergolong tuntas madya. Dari 12 indikator SPM Kesehatan terdapat 3 (tiga) indikator yang telah memenuhi target 100% yaitu indikator pelayanan Kesehatan balita, pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dan pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis. Selain itu terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian SPM yang cukup rendah yaitu indikator pelayanan Kesehatan penderita hipertensi (25,61%) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (40,92%).

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan Kesehatan juga didukung oleh penyediaan mutu layanan dasar. Pemberian layanan dasar yang bermutu dan berkualitas berpengaruh dalam capaian standar pelayanan minimal (SPM). Secara umum penyediaan mutu layanan Kesehatan di Kabupaten Gresik tergolong baik dan telah mencapai target. Penyediaan mutu layanan dasar memiliki nilai 20% dalam mendukung capaian SPM.

C. SPM Urusan Pekerjaan Umum

1. Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melakukan melaksanakan tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan updating data sub kegiatan terkait realisasi pemenuhan target pelayanan akses sanitasi setiap tahun (seperti data rumah tangga yang



- telah melakukan penyedotan lumpur tinja dan lumpur tinjanya diolah di IPLT, data pengolahan lumpur tinja di IPLT dan lain-lain)
- b. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kondisi sanitasi di Kabupaten Gresik.
 - c. Melakukan pendataan BNBA bagi SR yang merupakan program dari pemerintah daerah;
 - d. Melakukan pengumpulan data SR terpasang dan kebutuhan SR belum terpasang melalui pendataan HIPPAM di tiap Desa;
 - e. Melakukan study geolistrik untuk mengumpulkan data potensi air baku tanah pada suatu wilayah.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pengolahan data dengan membandingkan jumlah kebutuhan akses sanitasi dari Dinas Kesehatan dengan capaian penyediaan prasarana sanitasi yang dibangun oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Menentukan wilayah pelayanan dan jumlah rumah tangga yang akan menerima pelayanan dasar dan menghitung penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada kondisi eksisting.
- c. Melakukan pengumpulan data SR terpasang dan kebutuhan SR belum terpasang melalui pendataan HIPPAM di tiap Desa;
- d. Adanya daftar tunggu SR yang diperoleh dari permintaan Desa melalui pengajuan proposal pemenuhan kebutuhan air bersih.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.

- a. Rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;



- b. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

- a. Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.
- b. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah domestik mulai dari hulu (dilakukan masyarakat) hingga ke hilir.
- c. Pemerintah daerah menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja, dimana lumpur tinja yang telah disedot selanjutnya diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Layanan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan sanitasi aman di Kabupaten Gresik.
- d. Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan atau jasa yang dibutuhkan dengan menyesuaikan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah lokasi STUNTING dan SPAM Regional Umbulan.

D. SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

1. Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data Pemerintah daerah Kabupaten Gresik melakukan melaksanakan tahapan sebagai berikut:

- 1) Data dasar yang digunakan adalah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Gresik yang disusun pada tahun 2021. Data tersebut kemudian



ndianalisadandisesuaikandengankejadianbencanayangterjadidalambeberap
atahunterakhir.Untukmenghitungluasmenggunakanluashasildeleasika
wasanrawanbencana.DataRT/RW, jumlah rumah, jumlah KK, dan dan jumlah
jiwa belum terdata secara optimalpadatahun2023

- 2) Melakukan perencanaan kegiatan pada tahun 2024 untuk pemetaan, pendataan guna melengkapi kekurangan data-data yang belum terakomodir pada tahun 2023.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahapan yang dilakukan pengumpulan data rumah yang terkena bencana, BNBA, dan target penyelesaian sebagai berikut:

- a. Kejadian bencana dilaporkan kepala desa kepada Bupati Gresik melalui BPBD Kabupaten Gresik mengetahui camat setempat. Laporan minimal meliputi jenis bencana, jumlah rumah dan warga terdampak.
- b. Bupati membuat Surat keputusan penetapan bencana yang sudah merujuk ke desa yang bersangkutan.
- c. BPBD Kabupaten Gresik bersama Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik melaksanakan pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan tiap rumah yang terdampak.
- d. Dinas CKPKP membuat laporan hasil pendataan dan verifikasi serta perhitungan jumlah kerugian atau biaya yang diperlukan untuk penanganan perbaikan dan atau relokasi rumah yang disampaikan kepada BPBD Kabupaten Gresik dan diteruskan kepada Bupati Gresik.
- e. Rencana pemenuhan dan pelaksanaan pemenuhan didasarkan pada hasil pendataan dan verifikasi yang telah dilakukan. Sumber pembiayaan ditentukan berdasarkan rapat koordinasi antar OPD terkait.



3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

- a. Rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar dan menuangkannya ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya ke dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BPBD Kabupaten Gresik melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

Pada Tahun 2023, kejadian bencana yang menyebabkan kerusakan rumah di Kabupaten Gresik adalah banjir, longsor, pergerakan tanah dan rob, dimana terdapat 13 rumah yang mengalami kerusakan dan telah dilaksanakan pemenuhan pelayanan dasar dengan melakukan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali dan relokasi/pembangunan baru. Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Gresik melalui dana BTT (Belanja Tidak Terduga).



E. SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Bidang Trantibum

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencatat data eksisting yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Gresik sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang meliputi dari rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dilokasi penegakan perda dan perkada, rekapitulasi daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada, rekapitulasi sop kegiatan penegakan perda/perkada, rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh opd satpol pp, rekapitulasi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh opd satpol pp (satpol pp, ppns, satlinmas), rekapitulasi perda perkada yang akan ditegakkan, rekapitulasi warga negara yang terdampak akibat penegakan perda dan perkada dalam radius 0-50 meter dan rekapitulasi aset yang dimiliki oleh warga negara yang rusak akibat penegakan perda dan perkada dalam radius 0-50 meter.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Dalam tahap ini, proses dilakukan dengan menghitung kebutuhan standar minimal yang harus dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Gresik dalam melayani masyarakat. Dimulai dari apa saja yang diperlukan untuk memenuhi mutu dan kualitas pelayanan masyarakat hingga berapa harga satuan masing-masing mutu tersebut dipenuhi. Sehingga dari sini akan muncul besaran anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan dasar oleh Satpol PP Kabupaten Gresik.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pada proses penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ini, Satpol PP Kabupaten Gresik menguraikan output dan outcome yang dihasilkan dari perhal yang di butuhkan di dalam tahap sebelumnya (Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar). Apakah sudah



sesuai dengan yang diharapkan atau belum, sehingga standar pelayanan minimal bisa berjalan dengan optimal.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pada tahap ini yaitu proses pencatatan akhir realisasi dari apa yang telah direncanakan oleh Satpol PP Kabupaten Gresik pada tahap-tahap sebelumnya. Dimana pada proses ini diuraikan juga permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, dan juga solusinya bagaimana untuk menghadapi permasalahan tersebut agar untuk tahun selanjutnya permasalahan tersebut tidak muncul kembali.

Bidang Kebencanaan

Kabupaten Gresik merupakan daerah yang berpotensi rawan terjadi bencana. Secara umum permasalahan bencana di Kabupaten Gresik diakibatkan faktor geografis dan faktor manusia, sehingga penanganan bencana ini perlu perencanaan dan penanganan yang serius. Untuk mengurangi resiko bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik menyusun strategi dan inovasi dalam upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas pelayanan, fokus pada target individu warga negara secara minimal untuk tiga jenis pelayanan dasar SPM yaitu : Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

1. Pengumpulan Data

1. Tahap Pengumpulan Data SPM Sub Urusan Bencana sebagai berikut:
 - a. Data Jumlah Kejadian Bencana meliputi:
Daftar Kejadian Bencana, Pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan penyajian data/informasi kejadian bencana dilakukan oleh



Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) sebagaimana tabel di bawah ini .

Tabel : Rekap Kejadian Bencana Tahun 2022

No.	Bulan	Jenis Kejadian bencana			
		Banjir	Tanah Longsor	Angin kencang / Angin Puttin Beliung	Kekeringan
1	JANUARI	4	2	3	
2	FEBRUARI	2		2	
3	MARET	6	1	1	
4	APRIL				
5	MEI	3			
6	JUNI	6			
7	JULI	5			
8	AGUSTUS			1	
9	SEPTEMBER				1
10	OKTOBER	3		4	1
11	NOVEMBER	5		1	
12	DESEM BER	5	2	2	
	JUMLAH	39	5		2

b. Data Daerah Rawan Bencana meliputi •

- 1 Daftar Warga Negara yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana;
- 2 Daftar Kerawanan Tempat Tinggal Individu Warga Negara;
- 3 Rekapitulasi Kelompok Warga Negara Berdasarkan Kelompok KerawananDesa;
- 4 Rekapitulasi Aparat dan Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana;
- 5 Rekapitulasi Warga Negara Wajib Latih, data Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- 6 Daftar Petugas Operasi Penanganan Darurat Bencana Berdasarkan Lokasi Penugasan Data Relawan dan Aparat Desa terjadinya bencana.



- c. Data Pada Saat Bencana meliputi:
1. Daftar Ketersediaan Peralatan Pendukung Operasi Tanggap Darurat Bencana.
 2. Daftar Ketersediaan Stok Logistik Pengungsian.
 3. Daftar Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana.
 4. Daftar Status Korban Bencana.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung SPM Sub Urusan Bencana BPBD Kabupaten Gresik terdiri dari ; Pegawai BPBD 41 Orang, Petugas Pusdalops – PBsebanyak 5 Orang, dan Relawan Penanggulangan Bencana ditiap desa sebanyak 100 Orang.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Dalam Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar hal yang menjadi utama adalah mutu pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan bencana Kabupaten/Kota penerapan dan pencapaian SPM Bidang Tramtibumlinmas Sub Urusan Bencana terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana,
Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten rawan bencana secara terperinci berbasis Kajian Resiko Bencana (KRB) kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.Selain Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kegiatan yang dilaksanakan melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan bencana.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berada di Kawasan Rawan Bencana}} \times 100\%$$



2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berada di Kawasan Rawan Bencana}} \times 100\%$$

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menagani dan menyelamatkan korban bencana.
Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana}}{\text{Perkiraan Jumlah Korban Bencana Secara Keseluruhan}} \times 100\%$$

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar



- a. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. BPBD menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam meningkatkan pelayanan SPM Sub Urusan Bencana dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

Bidang Pemadam Kebakaran

1. Pengumpulan Data

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengumpulan dan pengelolaan data melalui verifikasi dan validasi data RISP (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran).
- b. Data tersebut meliputi data penerima Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Pemetaan Wilayah rawan Kebakaran, Pemetaan wilayah lokasi jangkauan respon pelayanan, pemenuhan kebutuhan pos, sarana dan prasarana
- c. Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat Pemadam I baru berjumlah 30 orang yang tersebar di 3 pos. Pos Pemadam Kebakaran yang tersebar di 3 (tiga) wilayah.



2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Dalam tahap ini, proses dilakukan dengan menghitung kebutuhan standar minimal yang harus dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Gresik dalam melayani masyarakat. Dimulai dari apa saja yang diperlukan untuk memenuhi mutu dan kualitas pelayanan masyarakat hingga berapa harga satuan masing-masing mutu tersebut dipenuhi. Sehingga dari sini akan muncul besaran anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan dasar oleh Satpol PP Kabupaten Gresik.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pada proses penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ini, Satpol PP Kabupaten Gresik menguraikan output dan outcome yang dihasilkan dari apa saja yang dibutuhkan di dalam tahap sebelumnya (Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar). Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum, sehingga standar pelayanan minimal bisa berjalan dengan optimal.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pada tahap ini yaitu proses pencatatan akhir realisasi dari apa yang telah direncanakan oleh Satpol PP Kabupaten Gresik pada tahap-tahap sebelumnya. Dimana pada proses ini diuraikan juga permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, dan juga solusinya bagaimana untuk menghadapi permasalahan tersebut agar untuk tahun selanjutnya permasalahan tersebut tidak muncul kembali.

F. SPM Urusan Sosial

1. Pengumpulan Data

Dinas Sosial Kabupaten Gresik melakukan pengumpulan dan pengelolaan data melalui verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data PPKS terdiri dari 26 jenis Pemerlu Pelayanan, namun tidak semua jenis PPKS terdapat di Kabupaten Gresik. Data PPKS tersebut harus



masuk ke dalam DTKS, dimana di setiap desa dan kelurahan terdapat operator untuk mengentry usulan data tersebut. Selain itu, mitra kerja Dinas Sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di semua desa/kelurahan dan kecamatan juga ikut membantu mendata PPKS dan DTKS. Dari hasil verifikasi dan validasi data tersebut nantinya akan digunakan sebagai data calon penerima bantuan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran

Dinas Sosial memiliki data penerima Pelayanan Dasar yang terdiri dari Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana Alam dan Sosial. Untuk mendukung pelayanan PPKS, Dinas Sosial Kabupaten Gresik memiliki Shelter Balai Loka Bina Karya Cerme yang digunakan untuk tempat penampungan sementara bagi PPKS yang akan dirujuk/dikirim ke UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang tersebar di Jawa Timur sesuai dengan jenis kebutuhannya.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar



No	Jenis Kebutuhan Pelayanan Dasar	Keterangan
1	Jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki	Pegawai Dinas Sosial Kab. Gresik 52 orang, TKSK 18 orang, Pendamping PKH, LK3, Taruna Siaga Bencana 38 orang, Karang Taruna
2	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan	Alat bantu (Kursi Roda, Hearing Aid, Kaki dan Tangan Palsu, sepeda listrik, alat usaha seperti alat pijat), peralatan dapur umum bencana, logistik bencana, layanan kesehatan, pemberian pelatihan keterampilan, kendaraan operasional untuk penjemputan klien dan pengiriman rujukan
3	Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan	Alat bantu, Bantuan permakanan, sandang, layanan rujukan
4	Besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana	Disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia, tersedia dalam dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah (DPA)

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar dan menuangkannya dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Sosial Kabupaten Gresik menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya ke dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja sesuai dengan kondisi, situasi dan hasil koordinasi dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada awal Tahun untuk periode anggaran Tahun berikutnya.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar



Dinas Sosial Kabupaten Gresik melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan daerah. Di Dinas Sosial Kabupaten Gresik terdapat 2 Program, 3 kegiatan dan 13 sub kegiatan untuk pemenuhan pelayanan dasar yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana.



BAB III PENCAPAIAN SPM

A. SPM Bidang Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal. Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gresik secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan dasar terdiri atas:

A. pendidikan anak usia dini;

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun).

B. Pendidikan dasar;

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang terbagi dalam dua jenjang pendidikan, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Pertama.

C. Pendidikan kesetaraan;

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

2. Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang ditetapkan oleh Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :



Tabel III.A.1 Target SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	35.928	Tahun 2023	Angka partisipasi sekolah	82,56	Tahun 2023
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	88,00	Tahun 2023
					Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	76,59	Tahun 2023
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,34	Tahun 2023
					Kecukupan formasi guru ASN	50,00	Tahun 2023
					Indeks distribusi guru	0,85	Tahun 2023
					Proporsi PTK bersertifikat	54,58	Tahun 2023
					Proporsi PTK penggerak	2,00	Tahun 2023
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	163.241	Tahun 2023	Sekolah Dasar (SD)		
					Angka partisipasi kasar	103,62	Tahun 2023
					Angka partisipasi sekolah	101,00	Tahun 2023
					Angka partisipasi murni	97,00	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Kemampuan literasi	76,31	Tahun 2023
					Kemampuan numerasi	48,32	Tahun 2023
					Perbedaan Skor Literasi	2,5	Tahun 2023
					Perbedaan Skor numerasi	3,00	Tahun 2023
					Indeks iklim keamanan	68,53	Tahun 2023
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	57,22	Tahun 2023
					Kecukupan formasi guru ASN	83,19	Tahun 2023
					Indeks distribusi guru	0,58	Tahun 2023
					Proporsi PTK bersertifikat	47,51	Tahun 2023
					Proporsi PTK penggerak	75,00	Tahun 2023
					Pengalaman pelatihan guru	4,42	Tahun 2023
					Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
					Angka partisipasi kasar	96,9	Tahun 2023
					Angka partisipasi sekolah	97,00	Tahun 2023
					Angka partisipasi murni	79,03	Tahun 2023
					Kemampuan literasi	75,78	Tahun 2023
					Kemampuan numerasi	50,88	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Perbedaan Skor Literasi	2,33	Tahun 2023
					Perbedaan Skor numerasi	3,00	Tahun 2023
					Indeks iklim keamanan	72,9	Tahun 2023
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	56,65	Tahun 2023
					Kecukupan formasi guru ASN	83,19	Tahun 2023
					Indeks distribusi guru	0,58	Tahun 2023
					Proporsi PTK bersertifikat	61,86	Tahun 2023
					Proporsi PTK penggerak	75,00	Tahun 2023
					Pengalaman pelatihan guru	7,19	Tahun 2023
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.243	Tahun 2023	Angka partisipasi sekolah	77,00	Tahun023
					Kemampuan literasi	85,27	Tahun023
					Kemampuan numerasi	50,92	Tahun023
					Perbedaan Skor Literasi	2,50	Tahun023
					Perbedaan Skor numerasi	3,00	Tahun023
					Indeks iklim keamanan	66,74	Tahun023
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	56,11	Tahun023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Proporsi PTK bersertifikat	3,13	Tahun023
					Pengalaman pelatihan guru	100,00	Tahun023



3. Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada Dinas Pendidikan bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel III.A.2 Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja/ Layanan SPM	Jenis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Urusan Pendidikan Kab. Gresik		472,538,376,779	387,173,661,665	81.93 %
1.	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini		64,152,842,170	55,953,341,646	87.22 %
1.	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD		52,498,077,820	45,860,191,605	87.36 %
	2. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali pertahun		37,999,820	37,972,600	99.93 %
	3. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		52,270,078,000	45,641,437,000	87.32 %
	4. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa		190,000,000	180,782,005	95.15 %
2.	Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan Satuan		2,948,363,746	2,664,283,100	90.36 %
1.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		1,474,975,150	1,229,293,052	83.34 %
2.	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1		387,718,596	363,280,320	93.70 %



No.	Indikator Kinerja/ Layanan SPM	Jenis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	(satu) kali dalam 6 (enam) bulan				
	4. Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		72,000,000	59,434,728	82.55 %
	5. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak		1,013,670,000	1,012,275,000	99.86 %
3.	Kegiatan Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)		7,546,697,970	6,694,052,741	88.70 %
	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		7,546,697,970	6,694,052,741	88.70 %
4.	Kegiatan Pemenuhan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PAUD)		1,159,702,634	734,814,200	63.36 %
	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan		1,159,702,634	734,814,200	63.36 %
2.	Program SPM Pendidikan Dasar		319,572,344,321	263,803,832,189	82.55 %
	5. Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		245,034,876,638	197,322,196,765	80.53 %
	2. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus		237,812,560,000	190,632,340,825	80.16 %
	3. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung		7,222,316,638	6,689,855,940	92.63 %
6.	Kegiatan Pemenuhan Kualitas Dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/mts/Paket A/Paket B)		2,200,792,567	1,202,157,262	54.62%



No.	Indikator Kinerja/ Layanan SPM	Jenis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut		1,113,642,567	620,578,086	55.73 %
	2. Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru		1,087,150,000	581,579,176	53.50 %
	7. Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/PaketA/Paket B)		35,125,989,655	32,704,026,580	93.10 %
	1. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		800,190,000	272,490,000	34.05 %
	2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		75,000,000	66,913,750	89.22 %
	3. Perbaiki terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat		20,210,341,655	19,746,963,780	97.71 %
	4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran		14,040,458,000	12,617,659,050	89.87 %
	8. Kegiatan Pemenuhan Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/PaketA/Paket B)		36,152,866,210	32,057,599,222	88.67 %
	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		35,957,796,210	31,895,192,472	88.70 %



No.	Indikator Kinerja/ Layanan SPM	Jenis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan		195,070,000	162,406,750	83.26 %
	9. Kegiatan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)		1,057,819,251	517,852,360	48.95 %
	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan		1,057,819,251	517,852,360	48.95 %
3.	Pendidikan Kesetaraan		88,813,190,288	67,416,487,830	75.91 %
	10. Pemenuhan Layanan dasar SPM (Kesetaraan)		32,475,102,000	18,001,894,500	55.43 %
	2. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus		32,475,102,000	18,001,894,500	55.43 %
	11. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)		113,164,942	111,673,292	98.68 %
	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut		95,510,000	95,097,700	99.57 %
	2. Pelatihan/seminar / lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru		17,654,942	16,575,592	93.89 %
	12. Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)		55,337,076,526	48,515,384,421	87.67 %
	2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		3,000,000	2,476,447	82.55 %
	3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat		55,334,076,526	48,512,907,974	98,75%



No.	Indikator Kinerja/ Layanan SPM	Jenis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
13.	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)		887,846,820	787,535,617	88.70 %
	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		887,846,820	787,535,617	88.70 %

4. Dukungan Personil

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut tabel jumlah personil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Tabel III.A.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
1	Eselon	
	a. II B	1
	b. III A	1
	c. III B	4
	d. IV A	8
	JUMLAH	14
2	JABATAN FUNGSIONAL	
	1. FUNGSIONAL GURU (TK,SD,SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	
	1. Golongan IV	
	2. Golongan III	1331
	3. Golongan II	3300
	4. Golongan I	19
	JUMLAH	4650
	2. FUNGSIONAL PENGAWAS (TK,SD,SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	30
	(2) Golongan III	0
	JUMLAH	30



No.	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
3. FUNGSIONAL PENILIK		
a. Pangkat/Golongan		
	(1) Golongan IV	19
	(2) Golongan III	8
	JUMLAH	27
3	JABATAN STRUKTURAL	
a. Pangkat/Golongan		
	(1) IV	8
	(2) III	103
	(3) II	191
	JUMLAH	302
4	NON ASN(KANTOR DINAS, TK, SD dan SMP)	
	JUMLAH	1847
TOTAL KESELURUHAN		6870

5. Hasil Capaian

Hasil capaian atau realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan di Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan tiga jenis pelayanan dasar, SPM urusan Pendidikan mencapai 100%. Berikut capaian SPM Kesehatan Tahun 2023:



Tabel III.A.5. 1 Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	35.928	35.928	100%	Angka partisipasi sekolah	82,56	82,56	100%
						Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	88,00	88,00	100%
						Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	76,59	76,59	100%
						Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,34	3,34	100%
						Kecukupan formasi guru ASN	50,00	50,00	100%
						Indeks distribusi guru	0,85	0,85	100%
						Proporsi PTK bersertifikat	54,58	54,58	100%
						Proporsi PTK penggerak	2,00	2,00	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
							37,16	37,16	100%
					Pengalaman pelatihan guru				
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	163.241	163.241	100%	Sekolah Dasar (SD)			
					Angka partisipasi kasar	103,62	103,62	100%	
					Angka partisipasi sekolah	101,00	101,00	100%	
					Angka partisipasi murni	97,00	97,00	100%	
					Kemampuan literasi	76,31	76,31	100%	
					Kemampuan numerasi	48,32	48,32	100%	
					Perbedaan Skor Literasi	2,5	2,5	100%	
					Perbedaan Skor numerasi	3,00	3,00	100%	
					Indeks iklim keamanan	68,53	68,53	100%	
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	57,22	57,22	100%	



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani
					Kecukupan formasi guru ASN	83,19	83,19	100%
					Indeks distribusi guru	0,58	0,58	100%
					Proporsi PTK bersertifikat	47,51	47,51	100%
					Proporsi PTK penggerak	75,00	75,00	100%
					Pengalaman pelatihan guru	4,42	4,42	100%
					Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
					Angka partisipasi kasar	96,9	96,9	100%
					Angka partisipasi sekolah	97,00	97,00	100%
					Angka partisipasi murni	79,03	79,03	100%
					Kemampuan literasi	75,78	75,78	100%
					Kemampuan numerasi	50,88	50,88	100%
					Perbedaan Skor Literasi	2,33	2,33	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						Perbedaan Skor numerasi	3,00	3,00	100%
						Indeks iklim keamanan	72,9	72,9	100%
						Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	56,65	56,65	100%
						Kecukupan formasi guru ASN	83,19	83,19	100%
						Indeks distribusi guru	0,58	0,58	100%
						Proporsi PTK bersertifikat	61,86	61,86	100%
						Proporsi PTK penggerak	75,00	75,00	100%
						Pengalaman pelatihan guru	7,19	7,19	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	1.243	1.243	100%	Angka partisipasi sekolah	77,00	77,00	100%
						Kemampuan literasi	85,27	85,27	100%
						Kemampuan numerasi	50,92	50,92	



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
		yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				Perbedaan Skor Literasi	2,50	2,50	100%
						Perbedaan Skor numerasi	3,00	3,00	100%
						Indeks iklim keamanan	66,74	66,74	100%
						Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	56,11	56,11	100%
						Proporsi PTK bersertifikat	3,13	3,13	100%
						Pengalaman pelatihan guru	100,00	100,00	100%



6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan antaralain:

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya kemampuan dan pemahaman pelaksana teknis dalam menganalisis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- b) Perencanaan kegiatan dan sub kegiatan belum mengacu pada perencanaan berbasis data dengan menganalisis rapor pendidikan
- c) Penyediaan layanan dasar Pendidikan Kesetaraan belum optimal menjangkau seluruh anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Gresik
- d) Kurangnya monitoring dan evaluasi dalam keseluruhan tahapan penerapan dan pemenuhan SPM di Internal Dinas Pendidikan, baik dalam hal capaian indikator layanan SPM maupun anggaran yang mendukung kegiatan dan sub kegiatan SPM

2. Solusi

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan kegiatan yang menunjang peningkatan kapasitas pelaksana teknis pengampu indikator SPM
- b) Perencanaan kegiatan dan sub kegiatan perlu diselaraskan dengan perencanaan berbasis data dengan menganalisis rapor pendidikan
- c) Melaksanakan koordinasi dengan operator sekolah mengenai validasi data anak putus sekolah pada aplikasi kemendikbud dan koordinasi dengan PKK dan Dinas PMD mengenai validasi data anak usia sekolah yang belum pernah bersekolah, sehingga dapat difasilitasi secara optimal dalam Pendidikan Kesetaraan



- d) Perlunya komitmen bersama, baik pengambil keputusan maupun pelaksana teknis pengampu SPM di Dinas Pendidikan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tahapan penerapan dan pemenuhan SPM Pendidikan sehingga target setiap indikator yang direncanakan dapat dicapai secara maksimal dan anggaran yang mendukung pencapaian tersebut dapat dialokasikan secara efisien.

B. SPM Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan di Kabupaten Gresik yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik melaksanakan rincian jenis pelayanan dan rumus pencapaian spm kesehatan yang terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan tenatal sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar difasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja puskesmas tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator).}} \times 100\%$$



3. Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir

$$\frac{\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} = \frac{\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

4. Pelayanan Kesehatan Balita

$$\frac{\text{Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} = \frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar} + \text{Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} + \text{Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

$$\frac{\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$$

6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

$$\frac{\text{Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standard dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

$$\frac{\text{Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja PKM dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} = \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (numerator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja PKM dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100\%$$



8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

$$\frac{\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{= \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

$$\frac{\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{= \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

$$\frac{\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{= \frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

$$\frac{\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar}}{= \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

$$\frac{\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{= \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}} \times 100\%$$

2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik di Tahun Anggaran 2023 sebagai OPD pelaksana SPM kesehatan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:



Tabel III.B.2.1 Target SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	18.437	Tahun 2023	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	10.277	Tahun 2023
					2 . Tablet tambah darah	3.544	Tahun 2023
					3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	18.437	Tahun 2023
					4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	18.437	Tahun 2023
					5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	18.437	Tahun 2023
					6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	18.437	Tahun 2023
					7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	18.437	Tahun 2023
					8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18.437	Tahun 2023
					9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	108	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					10 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					11 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023
					12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	18,437	Tahun 2023
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkanlayanan kesehatan	18.678	Tahun 2023	1 . Formulir Partograf	18.678	Tahun 2023
					2 . Kartu ibu (rekam medis)	18.678	Tahun 2023
					3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18.678	Tahun 2023
					4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	219	Tahun 2023
					5 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	18,415	Tahun 2023	1 . Vaksin Hepatitis B0	18,415	Tahun 2023
					2 . Vitamin K1 injeksi	18,415	Tahun 2023
					3 . Salep/tetes mata antibiotik	18,415	Tahun 2023
					4 . Formulir bayi baru lahir	18,415	Tahun 2023
					5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	18,415	Tahun 2023
					6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18,415	Tahun 2023
					7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	108	Tahun 2023
					8 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					9 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	88,337	Tahun 2023	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	32	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	88,337	Tahun 2023
					3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	22,136	Tahun 2023
					4 . Vitamin A Biru	9,159	Tahun 2023
					5 . Vitamin A Merah	69,177	Tahun 2023
					6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	20,124	Tahun 2023
					7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	6,834	Tahun 2023
					8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	6,834	Tahun 2023
					9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	5,085	Tahun 2023
					10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	20,439	Tahun 2023
					11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	5,134	Tahun 2023
					12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	2,592	Tahun 2023
					13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	25,623	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	2,592	Tahun 2023
					15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	2,592	Tahun 2023
					16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	566,328	Tahun 2023
					17 . Peralatan Anafilaktik	847	Tahun 2023
					18 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	Tahun 2023
					19 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					20 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023
					21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	28	Tahun 2023
					22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	7,595	Tahun 2023
					23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	3,936	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlahwarganegarausiapendidikan dasaryangmendapatkanlayanankesehatan	178,412	Tahun 2023	1 . Buku raport kesehatanku 2 . Buku pemantauan kesehatan 3 . Kuesioner skrining kesehatan 4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah 5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah 6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi 7 . Tenaga kesehatan : Bidan 8 . Tenaga kesehatan : Perawat 9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	178,412 178,412 178,412 178,412 178,412 159 436 276 37	Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	28	Tahun 2023
					11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	4,431	Tahun 2023
					12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	7,595	Tahun 2023
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	855,839	Tahun 2023	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	57	Tahun 2023
					2 . Alat ukur berat badan	408,619	Tahun 2023
					3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	782	Tahun 2023
					4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	782	Tahun 2023
					5 . Alat : Tensimeter	245	Tahun 2023
					6 . Alat : Glukometer	266,334	Tahun 2023
					7 . Alat : Tes strip gula darah	855,839	Tahun 2023
					8 . Alat : Lancet	855,839	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					9 . Alat : Kapas alkohol	855,839	Tahun 2023
					10 . Alat : KIT IVA Tes	1,920	Tahun 2023
					11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4	Tahun 2023
					12 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	Tahun 2023
					13 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					14 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023
					15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	Tahun 2023
					16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	Tahun 2023
					17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	151,544	Tahun 2023	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	151,544	Tahun 2023
					2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	151,544	Tahun 2023
					3 . Buku kesehatan lansia	108	Tahun 2023
					4 . Tenaga kesehatan : Dokter	436	Tahun 2023
					5 . Tenaga kesehatan : Bidan	276	Tahun 2023
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat	37	Tahun 2023
					7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	28	Tahun 2023
					8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat		Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	Tahun 2023
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlahwarganegarapenderitahipertensi usia 15 tahun ke atas yangmendapatkanlayanan kesehatan	220,546	Tahun 2023	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	33	Tahun 2023
					2 . Tensimeter	93	Tahun 2023
					3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	220,546	Tahun 2023
					4 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	Tahun 2023
					5 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023
					7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	Tahun 2023
					8 . Obat Hipertensi	220,546	



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlahwarganegarapenderitadiabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkanlayanankesehatan	48,366	Tahun 2023	1 . Alat : Glukometer	266,334	Tahun 2023	
					2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	266,334		Tahun 2023
					3 . Alat : Kapas Alkohol	266,334		Tahun 2023
					4 . Alat : Lancet	266,334		Tahun 2023
					5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	48,366		Tahun 2023
					6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	32		Tahun 2023
					7 . Tenaga kesehatan : Dokter	108		Tahun 2023
					8 . Tenaga kesehatan : Bidan	436		Tahun 2023
					9 . Tenaga kesehatan : Perawat	276		Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	Tahun 2023
					11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	Tahun 2023
					12 . Obat Diabetes Melitus	48,366	Tahun 2023
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlahwarganegaradengangguanjiwa berat yangmendapatkanlayanankesehatan	2,215	Tahun 2023	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	33	Tahun 2023
					2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	10	Tahun 2023
					3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	350	Tahun 2023
					4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	99	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					5 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	Tahun 2023
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	32	Tahun 2023
					7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	32	Tahun 2023
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	18,112	Tahun 2023	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	9,750	Tahun 2023
					2 . Reagen Zn TB	1.100	Tahun 2023
					3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	18,112	Tahun 2023
					4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	69,524	Tahun 2023
					5 . Catridge tes cepat molekuler	18,112	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	18,112	Tahun 2023
					7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	195	Tahun 2023
					8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	163	Tahun 2023
					9 . Tenaga kesehatan : Perawat	52	Tahun 2023
					10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	52	Tahun 2023
					11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	20	Tahun 2023
					12 . Tenaga kesehatan masyarakat	42	Tahun 2023
					13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang	28,828	Tahun 2023	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	773	Tahun 2023
					2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	28,828	Tahun 2023
					3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	28,828	Tahun 2023
					4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	28,828	Tahun 2023
					5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	219	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	Tahun 2023
					7 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	Tahun 2023
					8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	158	Tahun 2023
					9 . Tenaga kesehatan masyarakat	71	Tahun 2023
					10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	15	Tahun 2023



Diketahui bahwa pada tabel III.B.2.1 Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Th 2023 yaitu 100%. Hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

3. Anggaran

Anggaran lokasi adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Alokasi anggaran SPM urusan Kesehatan Tahun 2023 Kabupaten Gresik sebesar Rp. 19.145.566.800,- yang bersumber dari APBD DAU senilai Rp. 786.589.000,- APBD DAK Fisik sejumlah Rp. 13.420.10.800,- dan APBD DAK Non Fisik senilai Rp. 4.938.827.000,-, Ketersediaan dan realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut:

Tabel III.B.3.1 Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
	URUSAN KESEHATAN KAB.GRESIK	4,938,827,000	4,628,161,124	93.71 %
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	4,938,827,000	4,628,161,124	93.71 %



No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
	URUSAN KESEHATAN KAB.GRESIK	4,938,827,000	4,628,161,124	93.71 %
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,938,827,000	4,628,161,124	93.71 %
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,551,101,000	1,483,259,300	95.63 %
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	107,806,000	106,286,000	98.59 %
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	113,814,000	105,320,000	92.54 %
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	841,322,000	810,384,860	96.32 %
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	444,718,000	407,981,500	91.74 %
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	474,104,800	418,241,701	88.22 %
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	539,711,000	517,098,250	95.81 %
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	77,889,000	73,045,588	93.78 %
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	71,159,000	56,018,600	78.72 %



No	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
	URUSAN KESEHATAN KAB.GRESIK	4,938,827,000	4,628,161,124	93.71 %
	10.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	133,721,000	124,026,025	92.75 %
	11.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	327,326,200	293,266,800	89.59 %
	12.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	256,155,000	233,232,500	91.05 %

4. Dukungan Personil

Ketersediaan sumber daya manusia dalam upaya memberikan pelayanan minimal urusan kesehatan yang sesuai standar di Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagai berikut:.

Tabel III.B.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
1.	JABATAN STRUKTURAL		
a.	Eselon 2	Kepala Dinas	1
	Pangkat / Golongan	Pembina Tk. I	
	Pendidikan	S2	
b.	Eselon 3	Kepala bidang	4
	Pangkat / Golongan	Pembina Tk. I = 1 Pembina = 3	
	Pendidikan	S2 = 2 S1 = 2	



No	Jenis / Kualifikasi	Keterangan	Jumlah
2.	Jabatan Fungsional Tertentu		286
	a. Pangkat/golongan	Penata Tk. I = 213 Pembina = 37 Pembina Tk. I = 29 Pembina Utama Muda = 6 Pembina Utama Madya = 1	
	b. Pendidikan	Dokter = 111 S2 = 2 S1 = 109 Bidan = 20 S1 = 20 Perawat = 46 S2 = 1 S1 = 45	
3	Jabatan Fungsional Umum		54
	a. Pangkat/golongan	Penata Muda Tk I = 22 Penata = 14 Penata Tk I = 18	
	b. Pendidikan	S2 = 4 S1 = 45 SMA = 84	
4	Non ASN		
	Profesi (Pendidikan)	Dokter = 14 S2 = 1 S1 = 13 Bidan = 189 S2 = 0 S1 = 1 D4 = 10 D3 = 178 Perawat = 404 S1 = 69 D4 = 1 D3 = 334	
	Administrator (Pendidikan)	S1 = 11 D4 = 1 D3 = 17 SMA = 6	
JUMLAH TOTAL			



Tabel III.B.4. 2 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan
(Tenaga Kesehatan) Tahun 2023

No	Puskemas	Jenis SDM Kesehatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter	234	234
		Bidan	893	893
		Perawat	1308	1308
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter	234	234
		Bidan	893	893
		Perawat	1308	1308
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter	225	225
		Bidan	893	893
		Perawat	1308	1308
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter	219	219
		Bidan	893	893
		Perawat	1308	1308
		Nutrisionis/ Ahli Gizi	99	99
		Kader Kesehatan	7595	7595
		Dokter/ Dokter Ggi	219	219
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Bidan	893	893
		Perawat	1308	1308
		Nutrisionis/ Ahli Gizi	99	99
		Kesehatan Masyarakat	71	71
		Kader Kesehatan	4431	4431
		Dokter	219	219
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Bidan	893	893
		Perawat	1308	1308
		Nutrisionis/ Ahli Gizi	99	99
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	71	71
		Dokter/ Dokter Ggi	219	219
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Bidan	893	893
		Perawat	1308	1308



No	Puskemas	Jenis SDM Kesehatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Tersedia
		Nutrisionis/ Ahli Gizi	99	99
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	71	71
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter	219	219
		Bidan	893	893
		Perawat	1308	1308
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	71	71
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dokter	219	219
		Bidan	893	893
		Perawat	1308	1308
		Nutrisionis/ Ahli Gizi	99	99
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	71	71
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Dokter	420	420
		Bidan	32	32
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dokter	163	163
		Perawat	52	52
		ATLM	63	63
		Penata Rontgen	20	20
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	42	42
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dokter	219	219
		Bidan	893	893
		Perawat	1308	1308
		ATLM	158	158
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	71	71



5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023 untuk seluruh indikator SPM Kesehatan mencapai 100%. Berikut rincian capaian urusan kesehatan di Kabupaten Gresik:



Tabel III.B.5. 1. Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	18,437	18,437	100%	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	10,277	10,277	100%
						2. Tablet tambah darah	3,544	3,544	100%
						3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	18,437	18,437	100%
						4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	18,437	18,437	100%
						5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	18,437	18,437	100%
						6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	18,437	18,437	100%
						7. Kartu ibu/rekam medis ibu	18,437	18,437	100%
						8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18,437	18,437	100%
						9. Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis kebidanan	108	108	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						10. Tenaga kesehatan: Bidan	436	436	100%
						11. Tenaga Kesehatan: Perawat	276	276	100%
						12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	18,437	18,437	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	18,678	18,678	100%	1. Formulir Partograf	18.678	18,678	100%
						2. Kartu ibu (rekam medis)	18.678	18.678	100%
						3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18.678	18.678	100%
						4. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	219	219	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						5 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	18,415	18,415	100%	1 . Vaksin Hepatitis B0	18,415	18,415	100%
						2 . Vitamin K1 injeksi	18,415	18,415	100%
						3 . Salep/tetes mata antibiotik	18,415	18,415	100%
						4 . Formulir bayi baru lahir	18,415	18,415	100%
						5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	18,415	18,415	100%
						6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	18,415	18,415	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	108	108	100%
						8 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						9 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
4	Pelayanan	Jumlah balita yang mendapatkan layanan	88,337	88,337	100%	1 . Kuisisioner Pra Skrining	32	32	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
	Kesehatan Balita	kesehatan				Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku			
						2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	88,337	88,337	100%
						3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	22,136	22,136	100%
						4 . Vitamin A Biru	9,159	9,159	100%
						5 . Vitamin A Merah	69,177	69,177	100%
						6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	20,124	20,124	100%
						7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	6,834	6,834	100%
						8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	6,834	6,834	100%
						9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	5,085	5,085	100%
						10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	20,439	20,439	100%
						11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	5,134	5,134	100%
						12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	2,592	2,592	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	25,623	25,623	100%
						14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	2,592	2,592	100%
						15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	2,592	2,592	100%
						16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	566,328	566,328	100%
						17 . Peralatan Anafilaktik	847	847	100%
						18 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	108	100%
						19 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						20 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
						21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	28	28	100%
						22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	7,595	7,595	100%
						23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	3,936	3,936	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlahwarganegarausiapendidikan dasaryangmendapatkanlayanankesehatan	178,412	178,412	100%	1 . Buku raport kesehatanaku	178,412	178,412	100%
						2 . Buku pemantauan kesehatan	178,412	178,412	100%
						3 . Kuesioner skrining kesehatan	178,412	178,412	100%
						4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	178,412	178,412	100%
						5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	178,412	178,412	100%
						6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	159	159	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						8 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	37	100%
						10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	28	28	100%
						11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	4,431	4,431	100%
						12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	7,595	7,595	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	855,839	855,839	100%	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	57	57	100%
						2 . Alat ukur berat badan	408,619	408,619	100%
						3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	782	782	100%
						4 . Alat : Alat ukur lingkaran perut	782	782	100%
						5 . Alat : Tensimeter	245	245	100%
						6 . Alat : Glukometer	266,334	266,334	100%
						7 . Alat : Tes strip gula darah	855,839	855,839	100%
						8 . Alat : Lancet	855,839	855,839	100%
						9 . Alat : Kapas alkohol	855,839	855,839	100%
						10 . Alat : KIT IVA Tes	1,920	1,920	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4	4	100%
						12 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	108	100%
						13 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						14 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
						15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	37	100%
						16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	100%
						17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	7,595	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	151,544	151,544	100%	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	151,544	151,544	100%
						2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen	151,544	151,544	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)			
						3 . Buku kesehatan lansia	151,544	151,544	100%
						4 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	108	100%
						5 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	37	100%
						8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	100%
						9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	7,595	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlahwarganegarapenderitahipertensi usia 15 tahun ke atas yangmendapatkanlayanan kesehatan	220,546	220,546	100%	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	33	33	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						2 . Tensimeter	93	93	100%
						3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	220,546	220,546	100%
						4 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	108	100%
						5 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
						7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	100%
						8 . Obat Hipertensi	220,546	220,546	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	48,366	48,366	100%	1 . Alat : Glukometer	266,334	266,334	100%
						2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	266,334	266,334	100%
						3 . Alat : Kapas Alkohol	266,334	266,334	100%
						4 . Alat : Lancet	266,334	266,334	100%
						5 . Formulir pencatatan dan	48,366	48,366	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			
						6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	32	32	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	108	100%
						8 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						9 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
						10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	37	37	100%
						11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	28	100%
						12 . Obat Diabetes Melitus	48,366	48,366	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	2,215	2,215	100%	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa	33	33	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						terbaru (bila sudah tersedia)			
						2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	10	10	100%
						3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	350	350	100%
						4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	99	99	100%
						5 . Tenaga kesehatan : Dokter	108	108	100%
						6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	32	32	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	32	32	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	18,112	18,112	100%	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	9,750	9,750	100%
						2 . Reagen Zn TB	1.100	1.100	100%
						3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	18,112	18,112	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani
					4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	69,524	69,524	100%
					5 . Catridge tes cepat molekuler	18,112	18,112	100%
					6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	18,112	18,112	100%
					7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	195	195	100%
					8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	163	163	100%
					9 . Tenaga kesehatan : Perawat	52	52	100%
					10 . Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	52	52	100%
					11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	20	20	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						12 . Tenaga kesehatan masyarakat	42	42	100%
						13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	7,595	7,595	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	28,828	28,828	100%	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	773	773	100%
						2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	28,828	28,828	100%
						3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	28,828	28,828	100%
						4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	28,828	28,828	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	219	219	100%
						6 . Tenaga kesehatan : Perawat	276	276	100%
						7 . Tenaga kesehatan : Bidan	436	436	100%
						8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	158	158	100%
						9 . Tenaga kesehatan masyarakat	71	71	100%
						10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	15	15	100%



6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM urusan Kesehatan:

Tabel III.B.6. 1. Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ol style="list-style-type: none">1. Masih adanya K1 akses2. Mobilitas yang tinggi pada bumil3. adanya bumil yang pindah kelain tempat4. Adanya ibu hamil yang abortus	<ol style="list-style-type: none">1. Kerja sama dengan PKK dankader desa untuk melaporkan keBidan Desa apabila mengetahui adawarga yang hamil2. Memantau catin baik yang berKB atau yang tidak berKB dukasitentang pentingnya ANC yang rutin3. Melakukan promosi Kesehatan terkait Kesehatan selama kehamilan4. Melakukan koordinasi lintas serktor untuk integrasi dalam rangka pencapaian SPM
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ol style="list-style-type: none">1. Mobilitas ibu hamil yang tinggi2. Adanya kehamilan dengan abortus3. Adanya persalinan diluar wilayah Kab. Gresik sehingga tidak tercatat pada pelaporan4. Pada saat pelaporan SPM masih ada sasaran bumil yang belum waktunya bersalin dan hal tersebut berpengaruh terhadap capaian target.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk data yang digunakan2. Melakukan promosi Kesehatan terkait Kesehatan ibuyang dimulai sejak masa kehamilan dan persalinan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kesenjangan sasaran proyeksi dan sasaran riil, sehingga capaian SPM tidak bisa 100%.2. Belum waktunya KN Lengkap sehingga target tidak tercapai	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk data sebagai dasar target yang digunakan.



NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak semua balita datang ke posyandu pada saat pelayanan SDDITK2. Adanya penduduk musiman dengan mobilitas yang tinggi	Mengadakan kelas balita dan bekerja sama lintas program untuk melakukan kunjungan rumah dan meningkatkan edukasi kepada orang tua bayi dan balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Adanya kesenjangan sasaran proyeksi dan sasaran riil, sehingga capaian SPM tidak bisa 100%	Koordinasi dengan SKPD terkait untuk data yang digunakan.
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Banyak sasaran usia produktif tidak berada di rumah saat dilakukan kunjungan karena sedang Bekerja, sekolah dan lupa jadwal posyandu	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kunjungan rumah sasaran dan berkoordinasi dengan Bidan Desa maupun Perawat Desa untuk meningkatkan cakupan2. Membuat jadwal pelaksanaan posbindu dan melakukan kunjungan rumah dan kunjungan sekolah
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Lansia jarang datang berobat ke puskesmas maupun posbindu dikarenakan tidak mengetahui/lupa jadwal posyandu lansia	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan sweeping serta melaksanakan kegiatan posyandu lansia ke desa dengan prokes yang lebih baik2. Mengakumulasi data jumlah kunjungan lansia pada laporan Bidan Desa dan Perawat Desa3. Meningkatkan promosi kesehatan khususnya dengan sasaran yaitu lansia dan keluarga Advokasi Kepala Desa untuk memenuhi kebutuhan stik dengan menggunakan dana desa
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<ol style="list-style-type: none">1. Capaian pelaporan pelayanan Kesehatan ibu bersalin hanya terbatas pada fasilitas Kesehatan milik pemerintah (RSUD dan Puskesmas)	Tetap melakukan pemantauan terhadap kunjungan pasien Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada pasien hipertensi agar tetap melakukan pengobatan rutin dimasa pandemi ini, dan tetap melakukan skrining terhadap kunjungan pasien baru di Puskesmas



NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tidak ada permasalahan dan hingga TW 4 sudah dapat mencapai target	Upaya mencapai target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dilakukan dengan Berkoordinasi dengan Bidan Desa maupun Perawat Desa agar segera melaporkan jika ditemukan pasien DM
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Tidak ada permasalahan	Upaya untuk mencapai target yaitu dengan tetap berupaya melakukan sweeping dengan SDM yang ada agar tetap melakukan pengobatan rutin dimasa pandemi Covid-19.
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tidak ada permasalahan pada pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	<ol style="list-style-type: none">1. Upaya mencapai target dengan cara melakukan skrining / <i>case finding</i> ditempat berisiko seperti ponpes, perusahaan, dll.2. Petugas TB dan nakes lain tetapgiat melakukan penyisiran pasien terduga TB untuk mau memeriksakan dahaknya dengan cara petugas langsung yang membawakan sampelnya3. Selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dini terhadap penyakit TB serta perbedaan dengan gejala Covid-19
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i> =HIV)	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya stigma terhadap penyakit HIV/AIDS yang ada dikelangan masyarakat yang menyebabkan rasa enggan dan takut untuk melakukan pemeriksaan HIV2. Pemeriksaan HIV yang dilakukan di RS Swasta belum semuanya masuk ke sistem pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS (SIHA)	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan promosi kesehatan yang terintegratif terkait penyakit HIV/AIDS sehingga masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan pemeriksaan HIV dan mengurangi stigma negatif di masyarakat2. Melakukan kolaborasi terkait pelaporan HIV/AIDS di RS Swasta



C. SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari,
Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik,
Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pmda dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:



Tabel III.B.2.1 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	55.160	Tahun 2023	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas	17.647	Tahun 2023
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	17.647	Tahun 2023
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.370	Tahun 2023	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	534	Tahun 2023
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	18	Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	489	Tahun 2023
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1.504	Tahun 2023
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1.094	Tahun 2023



3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 63.790.274.476,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.705.190.408,- (81,05%), yang mana didalamnya terdapat unsur anggaran yang bersumber dari DAK. Anggaran ini dialokasikan untuk penyusunan rencana, peningkatan dan pengembangan SPAM, serta pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sistem pengolahan Air limbah domestik di Kabupaten Gresik sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara pada urusan pekerjaan umum. Adapun alokasi dana penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik antara lain:

Tabel III.C.3 1 Anggaran dan Realisasi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik	63,790,274,476	51,705,190,408	81.05 %
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	57,206,232,376	45,741,312,300	79.96 %
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	57,206,232,376	45,741,312,300	79.96 %
	5. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	6,994,480,194	3,513,777,174	50.24 %
	6. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	87,347,600	70,985,080	81.27 %



No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	7. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	42,086,180,780	34,986,468,714	83.13 %
	12. Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	5,234,750,800	4,366,608,330	83.42 %
	18. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	2,803,473,002	2,803,473,002	100.00 %
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6,584,042,100	5,963,878,108	90.58 %
	2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	6,584,042,100	5,963,878,108	90.58 %
	5. Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	697,870,000	648,578,015	92.94 %
	6. Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1,232,378,000	785,629,982	63.75 %
	10. Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	630,659,600	625,228,833	99.14 %
	12. Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	3,427,002,000	3,336,508,170	97.36 %
	14. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	353,866,000	352,206,624	99.53 %
	16. Rehabilitasi /peningkatan /perluasan sarana dan prasarana IPLT	242,266,500	215,726,484	89.05 %

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan



Umum. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

Tabel III.C.4 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Eselon 3	2
		2. Jabatan Fungsional	5
		a. Pangkat/Golongan	- Pembina (IV/a) - Penata Tk.I (III/d) - Penata Muda (III/a)
		b. Pendidikan	S2, S1
		3. Jabatan struktural	2
		a. Pangkat/Golongan	- Penata Tk.I (III/d) - Penata Muda (III/a)
		b. Pendidikan	S1
		4. Non PNS	6
		TOTAL	15
		2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik
2. Jabatan Fungsional	2		
a. Pangkat/Golongan	- Penata (IIIc) - Penata Muda/IIIa		
b. Pendidikan	S1		
3. Jabatan struktural	4		
a. Pangkat/Golongan	- Penata (III/c) - Penata Muda (III/a) - Pengatur (II/c)		
b. Pendidikan	S1, SMA		
4. Non PNS	29		
TOTAL	38		



5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tahun 2023 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mencapai angka 74,78% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel III.C.5 1 Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	55.160	55.160	100%	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	17.647	17,647	100.00 %
						2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	17.647	17.647	100.00 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.370	6.370	100%	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	534	534	100.00 %
						2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S	18	18	100.00 %



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
					terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)				
					3.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S	489	489	100.00	%
					terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)				
					4.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T	1.504	1.504	100.00	%
					terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)				



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani
					5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	1.094	1.094	100.00 %



6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah - langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di bidang urusan pekerjaan umum antara lain:

Tabel III.C.6.1 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
	Proses pengumpulan data di butuhkan anggaran dan waktu yang relatif lama dalam pendataan terkait kepemilikan tangki septik, IPAL dan SPAM.	Dilakukan pendataan secara bertahap melalui konsultan atau lembaga lain yang menyediakan data terkait kabupaten.
	Adanya persepsi yang berbeda terkait data dari masing-masing sektor.	Membuat kesepakatan terkait tugas masing-masing sektor dalam pemenuhan data serta menentukan bersama data yang akan digunakan.
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Kurangnya data yang akurat, jika tidak memiliki database yang akurat dan lengkap tentang gambaran kondisi sarana dan prasarana SPAM dan pengelolaan air limbah domestik yang dimiliki oleh masyarakat, maka akan sulit untuk menghitung kebutuhan yang tepat.	Dilakukan pendataan SPAM dan kepemilikan tangki septik serta derajat sanitasi, jika semua data terkait sudah tercukupi bisa dilakukan perhitungan dengan tepat terkait skala prioritas yang harus ditangani.



No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.	Penyusunan Rencana dan Penganggaran	
	Kendala anggaran: rendahnya anggaran yang dialokasikan dalam pemenuhan SPM PUPR kabupaten, seperti komitmen pendanaan untuk perbaikan sanitasi yang masih dibawah 2% dari total APBD Kabupaten.	<ul style="list-style-type: none">- Perangkat daerah menggunakan anggaran yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk memenuhi target yang sudah ditentukan.- Memanfaatkan sumber pendanaan lainnya seperti CSR dan DAK
4.	Pelaksanaan	
4.1	kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	Sosialisasi secara intensif baik melalui tatap muka maupun media sosial lainnya guna meningkatkan kesadaran masyarakat
4.2	Kendala terkait kurangnya lahan sarana prasarana sanitasi khususnya di wilayah perkotaan	Diarahkan ke IPAL Komunal
4.3	Pemenuhan penyediaan air bersih bagi daerah yang tidak dapat dijangkau oleh sistem pengaliran yang ada	Dipenuhi melalui sumur bor
4.4	Pelatihan tentang manajemen HIPPAM masih kurang	BIMTEK peningkatan kapasitas pengelola SPAM.

D. SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat



adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas:

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten
Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik pada bidang urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



Tabel III.D.2 1 Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	41	Tahun 2023	2.Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	10	Tahun 2023
					3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	
					4.Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	2	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	141	Tahun 2023	3.Penyediaan rumah layak huni	40	Tahun 2023



3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran yang dianggarkan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp. 3.364.046.220,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.238.254.556,- (96,26%). Anggaran ini dialokasikan untuk indikator identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau relokasi program kabupaten/kota dan pemenuhan pada program lain seperti program pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dan pengelolaan dana darurat dan mendesak, mengingat Kabupaten Gresik merupakan daerah rawan bencana.

Tabel III.D.3 1 Anggaran dan Realisasi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. GRESIK	3,364,046,220	3,238,254,556	96.26 %
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	789,846,220	664,054,556	84.07 %
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	42,021,700	38,425,320	91.44 %
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota	42,021,700	38,425,320	91.44 %
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	747,824,520	625,629,236	83.66 %



No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. GRESIK	3,364,046,220	3,238,254,556	96.26 %
	6. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	747,824,520	625,629,236	83.66 %
2.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			
	1. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2,274,200,000	2,274,200,000	100.00 %
	2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	300,000,000	300,000,000	100.00 %

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

Tabel III.D.4 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1. Eselon 3	2
		2. Jabatan Fungsional	2
		a. Pangkat/Golongan	- Penata (III/c) - Pembina (IV/a)



No	Jenis Pelayanan Dasar	Kualifikasi	Jumlah
		b. Pendidikan	- S1
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	3. Jabatan struktural (staf)	6
		a. Pangkat/Golongan	- Penata Muda (IIIa) - Pengatur (II/c)
		b. Pendidikan	S1, D3, SMA
		4. Non ASN	4
		TOTAL	14

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Tahun 2023 capaian spm urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan dua jenis pelayanan dasar sebagai berikut:



Tabel III.D.5 1 Realisasi Capaian Penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	41	41	100%	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	10	10	100%
						3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	100%
						4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	2	2	100%
						3 . Penyediaan rumah layak huni	40	40	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	141	141	100%	3 . Penyediaan rumah layak huni	40	40	100%



6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM di bidang urusan perumahan rakyat:

Tabel III.D.6. 1 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
1.1	Tahap identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana: Di Kabupaten Gresik terjadi Bencana yang rutin terjadi yaitu banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Kali Lamong yang terjadi di Kecamatan Balongpanggung, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinanom, dan Kecamatan Kedamean. Dampak yang diakibatkan oleh banjir Kali Lamong adalah lahan pertanian mengalami puso atau gagal panen dan air meluap hingga ke jaringan jalan arteri yang menghubungkan Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya sehingga mengganggu arus lalu lintas, serta wilayah permukiman yang tergenang hingga mencapai pinggang orang dewasa. Dalam kaitannya dengan SPM Rumah Bencana, kejadian bencana banjir secara umum dan historis tidak mengakibatkan kerusakan rumah di permukiman terdampak sehingga tidak bisa menjadi target rumah yang akan ditangani.	Diperlukan kerjasama yang efektif antara pihak yang terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga penanggulangan bencana, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan bahwa proses pengumpulan data rumah bencana sampai realisasi penanganan dapat berjalan dengan baik. Bagi masyarakat yang telah memperbaiki kerusakan rumah secara swadaya dapat diberikan bantuan penanganan dengan mekanisme Ganti Uang (GU).
1.2	Tahap identifikasi lahan potensial: Kabupaten Gresik belum menyediakan lokasi yang secara khusus diperuntukkan bagi relokasi rumah bencana, karena memang kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik secara umum adalah kejadian bencana yang tidak memerlukan penangan relokasi rumah. Namun Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki Rusun yang bisa digunakan sewaktu-waktu jika memang diperlukan.	Pada tahun 2023 akan diidentifikasi lokasi-lokasi tanah aset pemerintah yang memungkinkan digunakan sebagai lokasi relokasi diluar rusun yang telah disediakan.



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.3	Tahap penetapan bencana: Dalam penanganan kejadian bencana di Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini menetapkan SK Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat sebagai dasar untuk melakukan penanganan kedaruratan.	Kedepannya akan diupayakan agar bupati mengeluarkan SK Penetapan Bencana ataupun SK Tanggap Darurat yang minimal menyatakan lokasi kejadian dan dampak yang ditimbulkan.
1.4	Tahap pengumpulan data rumah: Proses pengumpulan data rumah memerlukan waktu yang relatif lama, sedangkan penanganan rumah akibat bencana membutuhkan waktu secepat-cepatnya, sehingga untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan, masyarakat tidak mau menunggu proses penyelesaian yang diperlukan dan lebih memilih untuk memperbaiki kerusakan rumah secara swadaya. Disamping itu, Kurangnya koordinasi dengan Tim Satgas Bencana sehingga bencana yang terjadi tidak tersampaikan atau terlambat tersampaikan kepada OPD Teknis. Kedepannya Tim Satgas dan OPD Teknis akan secara bersama-sama dan secepatnya melaksanakan pendataan dan verifikasi dampak/ kerugian bencana.	Meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses pelaksanaan pendataan dan verifikasi dampak/ kerugian bencana
1.5	Tahap Pengumpulan Data BNBA: Kurangnya dukungan dari masyarakat, masyarakat di lokasi rumah rawan bencana tidak memberikan dukungan dan kerjasama, tim pendataan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap.	Koordinasi dengan pemerintah Desa agar Pemerintah Desa menginformasikan kepada masyarakat terkait data-data yang diperlukan
2.	Perhitungan Kebutuhan	
2.1	Kurangnya data yang akurat: Jika tidak memiliki data yang akurat dan lengkap tentang jumlah dan kondisi rumah rawan bencana, maka sulit untuk menghitung kebutuhan rumah bencana yang tepat.	Melaksanakan pendataan dan verifikasi langsung antara DCKPKP dengan BPBD dengan dibantu Pemerintah Desa
2.2	Kendala anggaran: Penghitungan kebutuhan rumah bencana dapat membutuhkan anggaran yang cukup besar, terutama jika harus membangun banyak rumah bencana baru atau melakukan perbaikan rumah bencana yang sudah ada.	Menyediakan anggaran APBD khusus untuk menangan kejadian bencana; Melaksanakan mekanisme Belanja Tidak Terduga Memanfaatkan CSR perusahaan
2.3	Kurangnya dukungan dari masyarakat: Jika masyarakat di lokasi rumah rawan bencana tidak memberikan dukungan dan kerjasama, maka sulit untuk	Melaksanakan pendataan dan verifikasi langsung antara DCKPKP dengan BPBD dengan dibantu Pemerintah Desa



NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
	mengetahui kebutuhan rumah bencana yang sebenarnya.	
2.4	Masalah koordinasi: Terdapat beberapa masalah koordinasi yang dapat menghambat proses penghitungan kebutuhan rumah bencana, seperti kesulitan dalam mengkoordinasikan kegiatan antar berbagai pihak yang terkait, atau adanya ketidaksepakatan tentang jenis rumah bencana yang akan dibangun.	Melaksanakan pendataan dan verifikasi langsung antara DCKPKP dengan BPBD dengan dibantu Pemerintah Desa
3.	Penyusunan Rencana	
	Kendala yang dapat menghambat perencanaan dan penganggaran rumah bencana adalah Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi sehingga perencanaan dan penganggaran di awal tahun	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan anggaran APBD khusus untuk menangan kejadian bencana;- Melaksanakan mekanisme Belanja Tidak Terduga- Memanfaatkan CSR perusahaan
4.	Pelaksanaan	
	Proses pengumpulan data hingga Pelaksanaan relaisasi bantuan untuk rumah bencana memerlukan waktu yang relatif lama, sedangkan penanganan rumah akibat bencana membutuhkan waktu secepat-cepatnya, sehingga untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan, masyarakat tidak mau menunggu proses penyelesaian yang diperlukan dan lebih memilih untuk memperbaiki kerusakan rumah secara swadaya. Capaian SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten Gresik tahun 2023 sebesar 35,71%, capaian ini diperoleh dari data realisasi di bidang pertanahan, di mana terdapat target 14 lokasi tanah/rumah yang akan dibebaskan untuk kegiatan pembebasan lahan pada sempadan Kali Lamong, namun hanya dapat dilaksanakan pada 5 tanah/rumah, dikarenakan belum ada kesepakatan harga nilai ganti rugi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.	Meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses pelaksanaan pendataan dan verifikasi dampak/ kerugian bencana



E. SPMBidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota . Adapun SPM dibidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel III.E.1 1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Kategori	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Kategori pencapaian trantibum	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2	Kategori pencapaian kebencanaan	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana



No	Kategori	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Kategori pencapaian damkar	1. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Damkar)

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target SPM dibidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:



Tabel III.E.2 1 Target SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukumPerda dan Perkada Kabupaten/Kota	5,186	Tahun 2023	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	44	Tahun 2023
					2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	33	Tahun 2023
					3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	249	Tahun 2023
					4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	Tahun 2023
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	137,763	Tahun 2023	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	Tahun 2023



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	137,763	Tahun 2023
					3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	137,763	Tahun 2023
					4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana1	10	Tahun 2023
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	42,770	Tahun 2023	1.Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	79	Tahun 2023
					2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1,347	Tahun 2023
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	381,421	Tahun 2023	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	4	Tahun 2023
					2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	381,421	Tahun 2023



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	Tahun 2023
					4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	2	Tahun 2023
					5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	381,421	Tahun 2023
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	580	Tahun 2023	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	580	Tahun 2023
					2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukimandst.)	2	Tahun 2023
					3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	63	Tahun 2023



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	5	Tahun 2023
					5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	580	Tahun 2023
					6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	580	Tahun 2023



3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Tabel III.E.3 1 Anggaran dan Realisasi Penerapan SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	3,915,716,031	3,687,225,027	94.16%
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	800,432,800	796,064,850	99.45%
	1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	606,013,900	604,923,000	99.82%
	2. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	72,674,900	72,621,350	99.93%
	4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	20,844,000	18,125,500	86.96%
	5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	100,900,000	100,395,000	99.50%
	2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3,083,049,431	2,859,676,377	92.75%



No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2,175,397,731	2,151,861,702	98.92%
2.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60,969,700	60,175,550	98.7%
3.	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	846,682,000	647,639,125	76.49%
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	32,233,800	31,483,800	97.67%
1.	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	32,233,800	31,483,800	97.67%
2.	Program Penanggulangan Bencana (KEBENCANAAN)	2,882,280,125	1,894,395,865	65.73 %
	4. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	59,251,400	58,730,800	99.12%
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenisbencana)	59,251,400	58,730,800	99.12%
	5. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	997,876,000	850,486,840	85.23 %
2.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	567,890,000	560,519,840	98.70%
3.	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	29,474,000	29,466,200	99.97 %
4.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	62,710,000	61,780,000	98.52%
5.	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	20,180,000	20,151,200	99.86%
8.	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	69,025,000	65,499,000	94.89%
9.	Penyusunan rencana kontijensi	135,425,000	0	0%



No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
10.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	113,172,000	113,070,600	99.91%
6. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1,552,277,625	811,570,350	52.28 %
2.	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	198,652,000	184,937,300	93.10%
4.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	1,305,625,625	624,983,050	47.87%
6.	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	48,000,000	1,650,000	3.44 %
7. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		272,875,100	173,607,875	63.62%
2.	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	34,624,500	32,852,500	94.88 %
4.	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem informasi Kebencana	90,320,000	0	0%
5.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	20,168,000	19,097,000	94.69 %
6.	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	127,762,600	121,658,375	95.22%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	3,554,471,586	3,441,073,736	99.68 %
8. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		3,452,149,186	3,441,073,736	99.68 %
1.	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	2,121,460,000	2,114,760,000	99.68 %
2.	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	354,146,000	353,877,292	99.92 %
5.	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	333,990,000	333,149,838	99.75 %



No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
6.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	603,417,000	600,156,000	99.46%
7.	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	39,136,186	39,130,606	99.99%
9.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	23,438,000	23,418,470	99.92 %
1.	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	23,438,000	23,418,470	99.92 %
11.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	78,884,400	78,807,720	99.90 %
1.	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	78,884,400	78,807,720	99.90 %

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tangani oleh 3 organisasi perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran.

➤ Kategori pencapaian **trantibum** mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

Tabel III.E.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Pencapaian Trantibum Tahun 2023

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	11
	Eselon II	1
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina Tingkat I / (IV/c)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	1
	Eselon III	3



No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1
	Pembina / (IV/a)	1
	Penata Tk. I/ (III/d)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	2
	Strata 2 (S1)	1
	Eselon IV	7
	a. Pangkat/Golongan:	
	Pembina / (IV/a)	1
	Penata Tk.1 / (III/d)	5
	Penata Muda Tk.1 / (III/b)	1
	b. Pendidikan:	
	Strata 2 (S2)	2
	Strata 1 (S1)	4
	SMA	1
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	88
	a. Pangkat Golongan:	
	Penata Muda / (III/a)	13
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	66
	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	9
	b. Pendidikan:	
	Strata 1 (S1)	13
	SLTA	75
3.	Jabatan Fungsional Umum	16
	a. Pangkat Golongan:	
	Penata Tk.1 / (III/d)	1
	Penata Muda / (III/a)	6
	Pengatur Tingkat I / (II/d)	2
	Pengatur / (II/c)	4
	Pengatur Muda / (II/a)	1
	Juru Tingkat I / (I/d)	2
	b. Pendidikan :	
	Strata 1 (S1)	7
	Diploma 3 (D3)	4
	SMA	3
	SMP	2
4.	Non ASN	133
	Total	248



- Kategori pencapaian **kebencanaan** mempunyai dukungan personal sebagai berikut:

Tabel III.E.4. 2 Dukungan Personal Penerapan SPM Urusan
Trantibumlinmas Pencapaian Kebencanaan Tahun 2023

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	Jabatan Struktural	6
	Eselon II	1
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	1
	Eselon III	4
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina / (IV/a)	4
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	3
	Strata Satu (S1)	1
	Eselon IV	1
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata Tk.I / (III/d)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	1
2	Jabatan Fungsional Tertentu	6
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata Tk.I / (III/d)	6
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	6
3	Jabatan Fungsional Umum	8
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata / (III/c)	2
	Penata / (III/a)	3
	Pengatur / (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk.I / (II/b)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S1)	4
	Diploma III (D3)	2
	SMA	2
4	Non ASN	20
	Strata Satu (S1)	7
	Diploma III (D3)	2
	SMA	11
	TOTAL	47



- Kategori pencapaian **damkar** mempunyai dukungan personil sebagai berikut:

Tabel III.E.4. 3 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan
Trantibumlinmas Pencapaian Damkar Tahun 2023

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1	Jabatan Struktural	10
	Eselon II	1
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	1
	Eselon III	3
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina / (IV/a)	2
	Pembina / (IV/b)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	2
	Strata Satu (S1)	1
	Eselon IV	6
	a. Pangkat/Golongan	
	Pembina / (IV/a)	2
	Penata Tk.I / (III/d)	3
	Penata / (III/c)	1
	b. Pendidikan	
	Strata Dua (S2)	3
	Strata Satu (S1)	3
2	Jabatan Fungsional Tertentu	-
	a. Pangkat/Golongan	-
	b. Pendidikan	-
3	Jabatan Fungsional Umum	20
	a. Pangkat/Golongan	
	Penata Muda Tk.I / (IIIbd)	5
	Penata Muda / (III/a)	4
	Pengatur Tk. I / (II/d)	9
	Pengatur Muda Tk.I / (II/b)	2
	b. Pendidikan	
	Strata Satu (S2)	1
	Strata Satu (S1)	5
	SMA	11
	SMP	1
4	Non PNS	90
	Strata Satu (S1)	21
	Diploma III (D3)	6
	SMA	61
	SMP	1
	SD	1
	TOTAL	120



5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Tahun 2023 capaian SPM urusan Trantibumlinmas Kabupaten Gresik mencapai angka 93,33% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:



Tabel III.E.5. 1 Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023

No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara Kabupaten/Kota	5,186	5,186	100.00 %	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	44	44	100.00 %
						2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	33	33	100.00 %
						3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	249	249	100.00 %



No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
					4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	100.00 %	
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	137,763	137,763	100.00%	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100.00 %
					2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	137,763	137,763	100.00 %	
					3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	137,763	137,763	100.00 %	



No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
						4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	10	10	100.00 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	42,770	42,770	100.00%	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	79	79	100.00 %
						2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	1,347	1,347	100.00 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	381,421	381,421	100.00%	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam	4	4	100.00 %



No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
	korban bencana	dan evakuasi korban bencana				penyiapan petugas penanganan darurat bencana)			
						2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	381,421	381,421	100.00 %
						3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	2	100.00 %
						4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	2	2	100.00 %
						5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	381,421	381,421	100.00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh	580	911	100.00 %	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap	580	911	100.00 %



No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian				
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
	korban kebakaran	layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran				memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)			
					2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	2	2	100.00 %	
					3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	63	63	100.00 %	



No	Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Prosentase Capaian			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
					4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	5	5	100.00 %
					5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	580	911	100.00 %
					6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	580	911	100.00 %



6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

➤ Kategori pencapaian trantibum

Tabel III.E.6. 1 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Pencapaian Trantibum

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
	Form memerlukan data dukung yang terlalu rumit sehingga petugas kesulitan untuk mengisi form tersebut	Agar form tersebut dibuat lebih sederhana
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Adanya refocusing anggaran sehingga kebutuhan yang sudah direncanakan susah untuk direalisasikan.	Agar ada penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan Satpol PP Kabupaten Gresik
3.	Penyusunan Rencana	
	Tidak ada permasalahan, hanya menyesuaikan saja dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020	-
4.	Pelaksanaan	
	Tidak bisa mengisi pada bagian ganti rugi material dan biaya pengobatan, karena Satpol PP Kabupaten Gresik tidak mengganggu kegiatan tersebut.	Akan dianggarkan untuk kegiatan tersebut



➤ Kategori pencapaian kebencanaan

Tabel III.E.6. 2 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan
Trantibumlinmas Pencapaian Kebencanaan

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
	Pengisian formulir pengumpulan data menyangkut kerahasiaan data pribadi warga negara di kawasan rawan bencana (by name, by address, by NIK)	Integrasi sistem informasi kebencanaan dengan sistem informasi desa, sistem informasi kesejahteraan sosial, sistem informasi kependudukan dan sistem informasi pemerintahan daerah.
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Waktu yang lama karena Banyaknya form yang harus diisi sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021 untuk menghitung kebutuhan pelayananan pada sub urusan bencana	Aplikasi yang diterapkan dengan standar yang ada akan memberikan jembatan untuk menganalisis data yang lebih baik dan komprehensif
3.	Penyusunan Rencana	
	Tidak ada permasalahan, hanya menyesuaikan saja dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020	-
4.	Pelaksanaan	
	Keterbatasan APBD untuk membiayai semua kegiatan pendukung SPM	Memaksimalkan APBD yang ada untuk pelaksanaan kegiatan pendukung SPM



➤ Kategori pencapaian pemadam kebakaran

Tabel III.E.6. 3 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan
Trantibumlinmas Pencapaian Pemadam Kebakaran

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	
	Tidak ada masalah	Setiap kejadian selalu dilaporkan dan direkap setiap 1 bulan sekali
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Kebutuhan sarana dan prasarana didasarkan luas wilayah, kepadatan dan tingkat kesulitan lokasi	Membentuk Forum Damkar yang beranggotakan para pelaku usaha, melakukan Kerjasama kepada perusahaan yang memiliki armada Pemadam Kebakaran
3.	Penyusunan Rencana	
	Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga sulit untuk diwujudkan pemenuhan sarana dan prasarananya	1. Mengajukan Tambahan Anggaran 2. Bekerjasama dengan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian Kegiatan CSR nya
4.	Pelaksanaan	
	Belum sesuai ketentuan sebagaimana yang diharapkan sesuai Permendagri No 114 tahun 2018 tentang Standart pelayanan Minimal	Meningkatkan kegiatan Pemberdayaan masyarakat tentang bahaya kebakaran dan pencegahan sejak dini



F. SPM Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah dibidang Urusan Sosial antara lain:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti sosial;
5. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti sosial;
6. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial;
7. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.



Tabel III.F.2. 1 Target SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah warga penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di panti	737	Tahun 2023	Layanan data dan pengaduan	150	Tahun 2023
				Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	150		
				Penyediaan permakanaan	313		
				Penyediaan sandang	3		
				Penyediaan alat bantu	88		
				Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	3		
				Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritua, dan sosial	4		
				Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	60		
				Fasilitan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah, dan /atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	85		
				Akses kelanyanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	4		



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	
					Layanan rujukan	3	
2	Rehabilita sisosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	6.877	Tahun 2023	Layanan data dan pengaduan	250	Tahun 2023
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	250	
					Penyediaan permakanaan	127	
					Penyediaan sandang	1	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	45	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritua, dan sosial	6,795	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	45	
					Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah, dan /atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	30	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas	267	



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					layanan pendidikan dan kesehatan		
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	12	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12	
					Layanan rujukan	52	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usiaterlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	17.825	Tahun 2023	Layanan data dan pengaduan	50	Tahun 2023
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	50	
					Penyediaan permakanaan	2,267	
					Penyediaan sandang	300	
					Penyediaan alat bantu	4	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	251	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritua, dan sosial	18,286	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	13	
					Fasilitan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah/ bukti dokumen kependudukan	3	



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Akses kelanyanan kesehatan dasar /fasilitas layanan kesehatan	256	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	
					Layanan rujukan	10	
4	Rehabilitasi social dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	101	Tahun 2023	Layanan data dan pengaduan	101	Tahun 2023
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	101	
					Penyediaan permakanaan	101	
					Penyediaan sandang	101	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (penyediaan P3K)	80	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritua, dan sosial	57	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	5	
					Fasilitan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, surat nikah dan/atau kartu identitas anak/ bukti dokumen kependudukan	24	



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Akses kelanyanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	80	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	50	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50	
					Layanan rujukan	80	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca bencana	5,545	Tahun 2023	Penyediaan pemakanan	5,343	Tahun 2023
					Penyediaan sandang	100	
					Penyediaan tempat penampungan pengungsi	3	
					Penanganan khusus bagi kelompok rentan	31	
					Pelayanan dukungan psikososial	68	
					Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan (di lakukan dengan mengunggah dokumen from dan/ atau dokumen pendukung lainnya	0	



3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Sosial antara lain:

Tabel III.F.3. 1 Anggaran dan Realisasi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	URUSAN SOSIAL KAB.GRESIK	6,587,024,920	6,317,774,983	95.91 %
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6,587,024,920	6,317,774,983	95.91 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6,495,789,920	6,226,539,983	95.86 %
3.	Penyediaan alat bantu	180,207,500	179,617,572	99.67 %
5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	6,001,669,400	5,740,689,081	95.65 %
6.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	50,950,000	49,950,000	98.04 %
7.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	22,266,200	22,266,200	100.00 %



No.	Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
8.	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	59,214,000	53,108,350	89.69 %
9.	Pemberian layanan data dan pengaduan	4,767,000	4,767,000	100.00 %
10.	Pemberian layanan kedaruratan	42,183,020	41,692,980	98.84 %
12.	Pemberian layanan rujukan	134,532,800	134,448,800	99.94 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	91,235,000	91,235,000	100.00 %
1.	Penyediaan makanan	50,000,000	50,000,000	100.00 %
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	27,900,000	27,900,000	100.00 %
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	13,335,000	13,335,000	100.00 %

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Dukungan personil pada Bidang Urusan Sosial antara lain:

Tabel III.F.4. 1 Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
1.	Eselon 2	1
	Eselon 3	4
	Eselon 4	1
2.	Jabatan Fungsional	7
	a. Pangkat/golongan	
	Penata Muda Tk. I (III b)	1



No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
	Penata (III c)	1
	Penata Tk. I (III d)	3
	Pembina (IV a)	2
	b. Pendidikan	
	S1	5
	S2	2
3.	Jabatan Struktural	13
	a. Pangkat/golongan	
	Pengatur Muda Tk. I - II/b	2
	Pengatur - II/c	1
	Pengatur Tk. I - II/d	2
	Penata Muda - III/a	6
	Penata Muda Tk. I - III/d	1
	Pembina - IV/a	1
	b. Pendidikan	
	SMA	5
	S1	7
	S2	1
4.	Non ASN	26
	a. Pendidikan	
	SMA	14
	S1	12
	TOTAL	52



5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Tahun 2023 capaian spm urusan sosial Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel III.F.5. 1 Realisasi Capaian Penerpan SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Target	Prosentase Target	Jumlah Capaian	Prosentase Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	737	100 %	737	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	6.877	100 %	6.877	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	17,825	100 %	17,825	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	101	100 %	101	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	5,545	100 %	5,545	100 %



6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM. Adapun permasalahan SPM urusan sosial meliputi:

Tabel III.F.6. 1 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	
	Keterbatasan SDM saat mengumpulkan dan mengelola data dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan	Pengumpulan dan pengelolaan data dilaksanakan di akhir Tahun sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai pada Tahun N
2	Perhitungan Kebutuhan	
	Kebutuhan untuk penanganan Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Terlantar serta Tuna Sosial (terutama Gelandangan dan Pengemis) tidak dapat diprediksi karena sesuai kondisi yang ada	Karena banyaknya kebutuhan PPKS sehingga hanya pelayanan dasar yang diberikan sesuai kemampuan APBD
3	Perencanaan dan Penganggaran	
	Perencanaan dan penganggaran kurang sesuai karena adanya refocusing anggaran	Diusahakan agar kegiatan dialokasikan untuk SPM tidak mengalami refocusing sehingga pelayanan minimal dasar dapat terpenuhi
4	Pelaksanaan	
	Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dibantu oleh mitra kerja Dinas Sosial seperti TKSK, Pendamping PKH, Tagana dan LK3
	Adanya penerima bantuan yang meninggal dunia, pindah domisili tanpa memberitahu petugas	Kondisi ini tidak dapat diprediksi dan diluar jangkauan Dinas Sosial sedangkan bantuan



No	PERMASALAHAN	SOLUSI
	desa/kelurahan setempat dan ada yang menolak diberikan bantuan karena merasa sudah cukup mampu membuat bantuan sosial tidak dapat tersalur 100%	yang diberikan harus melalui pengajuan SK Hukum terlebih dahulu
5	Lain-Lain	
	Kabupaten Gresik tidak memiliki Panti yang dikelola oleh Daerah sehingga harus berkoordinasi dengan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan jika tidak ada maka akan ditampung sementara di Shelter BLBK Cerme	Diusulkan untuk membangun Panti milik Kabupaten Gresik



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Lintas OPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral untuk kebijakan/program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dan spatial untuk kebijakan atau program lintas dinas.

Program OPD

Program OPD ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program OPD ini lebih mudah khususnya didalam pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program OPD hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

Program Lintas OPD

Program lintas OPD ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan memang urusan OPD yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu dinas, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas OPD. Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas OPD) akan lebih bermanfaat dari pada program – program OPD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini. Adapun program kegiatan per urusan yang dilakukan antara lain :



A. Program Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

Adapun program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

Tabel IV.A.

Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	424.429.200.354
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	167.797.046.746
1.01.02.2.01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000
1.01.02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.674.196.029
1.01.02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.745.601.867
1.01.02.2.01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.105.181.405
1.01.02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	90.882.667
1.01.02.2.01.15.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	433.787.971
1.01.02.2.01.16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.126.286.000
1.01.02.2.01.23.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	612.065.867
1.01.02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	400.000.000
1.01.02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	192.300.000
1.01.02.2.01.26.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	195.070.000
1.01.02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	679.923.751
1.01.02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8.251.700.000
1.01.02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	139.290.051.189
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	114.856.952.004
1.01.02.2.02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.449.211.175
1.01.02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.631.655.116
1.01.02.2.02.15.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	533.241.900



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
1.01.02.2.02.17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	951.362.850
1.01.02.2.02.18.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	611.932.025
1.01.02.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	507.959.288
1.01.02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	-
1.01.02.2.02.27.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.309.080.000
1.01.02.2.02.35.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	307.860.000
1.01.02.2.02.36.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	395.260.936
1.01.02.2.02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400.190.000
1.01.02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	450.387.568
1.01.02.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	377.895.500
1.01.02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6.401.082.200
1.01.02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	96.529.833.446
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	56.133.675.604
1.01.02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.013.670.000
1.01.02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	-
1.01.02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	190.000.000
1.01.02.2.03.14.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	37.999.820
1.01.02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.159.702.634
1.01.02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.462.225.150
1.01.02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	52.270.078.000
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	85.641.526.000
1.01.02.2.04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	95.510.000
1.01.02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	53.070.914.000
1.01.02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	32.475.102.000



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	637.973.538
1.01.03.2.01.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	234.100.000
1.01.03.2.01.01.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	35.050.000
1.01.03.2.01.02.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	35.050.000
1.01.03.2.01.03.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-
1.01.03.2.01.04.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	164.000.000
1.01.03.2.02.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	403.873.538
1.01.03.2.02.01.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	124.854.500
1.01.03.2.02.02.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	205.000.000
1.01.03.2.02.03.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	74.019.038
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	43.670.005.781
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43.670.005.781
1.01.04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43.670.005.781
1.01.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	150.000.000
1.01.05.2.01.	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	75.000.000
1.01.05.2.01.01.	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000
1.01.05.2.01.02.	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000
1.01.05.2.02.	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	75.000.000



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
1.01.05.2.02.01.	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000
1.01.05.2.02.02.	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000
1.01.05.2.02.03.	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000
1.01.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	75.000.000
1.01.06.2.01.	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
1.01.06.2.01.06.	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000
JUMLAH		468.962.179.673



B. Program Kegiatan SPM Urusan Kesehatan

Implementasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi SPM dapat memperkuat sisi promotif – preventif sehingga diharapkan akan berdampak pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN. Berikut ini Program dan Kegiatan Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

Tabel IV.B
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	KESEHATAN MASYARAKAT		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4.	Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Balita
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Pelayanan Kesehatan pa
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)			Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes melitus



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga tuberculosis
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)			Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>)

C. Program Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

Tabel IV.C
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum 2023

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan 2. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan 3. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan 4. Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM 5. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan



NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman 2. Pembangunan/ penyediaan sub sistem pengolahan setempat 3. Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 4. Pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman 5. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 6. Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT



D. Program Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat

Program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

Tabel IV.D
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Perumahan Rakyat 2023

N O	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	a. Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
			2. Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	a. Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
			b. Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota

E. Program Kegiatan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

➤ **Kategori pencapaian trantibum**

Tabel IV.E.1
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Trantibumlinmas (Trantibum) Tahun 2023



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
				2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
				3. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
				4. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
			2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
				2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				dan Peraturan Bupati/Walikota
				3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

➤ **Kategori pencapaian kebencanaan**

Tabel IV.E.2
Program dan Kegiatan Pendukung SPMUrusan Trantibumlinmas
(Kebencanaan) Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 3. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Kesiapsiagaan terhadap Bencana
				4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan terhadap Bencana
				5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
				6. Penyusunan Rencana Kontijensi
				7. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 3. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

➤ **Kategori pencapaian damkar**

Tabel IV.E.2

Program dan Kegiatan Pendukung SPMUrusan Trantibumlinmas (Damkar)
Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Damkar)	1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
			3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

F. Program Kegiatan SPM Urusan Sosial

Program kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan guna mendukung pencapaian SPM antara lain :

Tabel IV.F.
Program dan Kegiatan Pendukung SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	1. Penyediaan Alat Bantu 2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	2. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 3. Pemberian Layanan Rujukan
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 2. Pemberian Layanan Rujukan
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	1. Pemberian Layanan Kedaruratan 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 3. Pemberian Layanan Rujukan
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bencana	1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	1. Penyediaan Makanan 2. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 3. Pelayanan Dukungan Psikososial



BAB V PENUTUP

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal digunakan untuk melihat perkembangan penerapan SPM baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu pelaporan pencapaian SPM juga digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat dan sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Untuk Kabupaten Gresik khususnya, laporan capaian SPM ini diharapkan dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam penetapan pembangunan pemerintah daerah sehingga program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

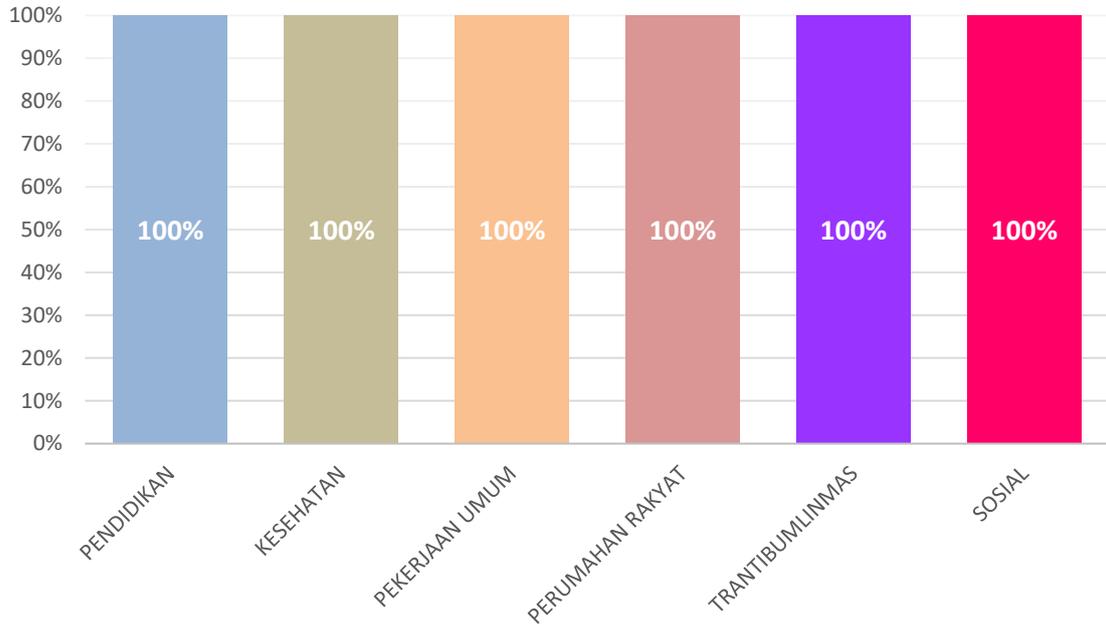
Berikut ini disampaikan Persentase Pencapaian SPM di Kabupaten Gresik Tahun 2023, sebagai berikut:

CAPAIAN PENERAPAN SPM TAHUN 2023

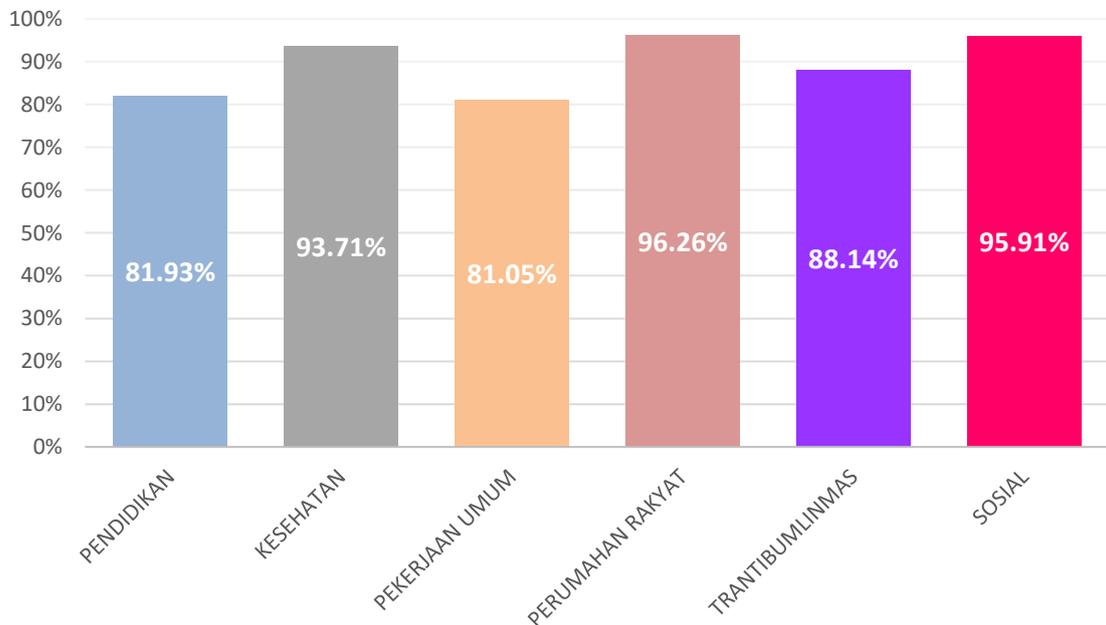
NO	NAMA	TOTAL CAPAIAN
	KAB. GRESIK	100 %
1	BIDANG PENDIDIKAN	100 %
2	BIDANG KESEHATAN	100 %
3	BIDANG PEKERJAAN UMUM	100 %
4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	100 %
5	BIDANG TRANTIBUMLINMAS	100 %
6	BIDANG SOSIAL	100 %



REALISASI CAPAIAN SPM TAHUN 2023



REALISASI ANGGARAN SPM TAHUN 2023





Guna mencapai Standar Pelayanan Minimal sesuai target nasional pada batas waktu yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing maka telah dijalin komitmen bersama dari seluruh *stakeholders* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan upaya pembinaan berkelanjutan kepada aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Demikian Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gresik yang dapat kami sampaikan yang berisikan kegiatan Penyusunan Capaian SPM Tahun 2023. Diharapkan pelaporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait didalam SPM telah dijalankan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.



LAMPIRAN



SK TIM PENERAPAN SPM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 100/ 262 /HK/437.12/2023

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;





- 2 -

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
- a. menyusun dan mengoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan Standar Pelayanan
 - c. minimal provinsi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal;



- 3 -

- d. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
- e. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
- f. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- g. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- h. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah Kabupaten;
- i. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten;
- j. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal daerah Kabupaten;
- k. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- l. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;



- 3 -

- d. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
- e. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
- f. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- g. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- h. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah Kabupaten;
- i. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten;
- j. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal daerah Kabupaten;
- k. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- l. menerima dan merindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;





- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 100/ ~~262~~ /HK/437.12/2023
TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN
GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Penanggungjawab I	Bupati Gresik.
2.	Penanggungjawab II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; d. Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; f. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;



- 6 -

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
		g. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik; h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik; i. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; j. Inspektur Kabupaten Gresik; k. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik; l. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; m. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; n. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; o. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; p. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan q. Nur Alifah, S.E., M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



1. URUSAN PENDIDIKAN

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

KABUPATEN GRESIK

No	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/ SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B.		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN		PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5- 6 TAHUN KUINTIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERTINGGI	
		JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5- 6 TAHUN YANG MENGIKUTI PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5- 6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKET A	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERTINGGI PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/KB/SPS/TPA)	35928	38272							9,29	9,29
2	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)			117512	122353	46299	62118	163811	184471		



FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRIST EK	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA TERSEBUT	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1
	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	8	16	Data Belum Tersedia	22	0,46	0,85
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)	1430	5573	16	110	0,36	0,58
3	-	-	-	-	-	-	-
4	Pendidikan Anak Usia Dini	8	16	-	22	0.46	0.85
5	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)	1430	5573	16	110	0.36	0.58



FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

KABUPATEN GRESIK

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	-5,85	80,66	8,42	49,76



FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI
DAN NUMERASI
KABUPATEN GRESIK

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	3,89	3,89	0,51	0,51	1,84	1,84	0,34	0,34



FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN GRESIK

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B		PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD	
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B	JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1	JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK DITAMBAH JUMLAH PENILIK PAUD NONFORMAL	JUMLAH SATUAN PAUD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	681	707	88,1	76,59	38	1648



FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

KABUPATEN GRESIK

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	67,26	68,72	60,21	56,52



FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Penambahan Ruang Kelas Baru	1 Jumlah penambahan Ruang Kelas Baru SD	Ruang	4	4	0	250.000.000	-
				2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	Unit	10	10	0	75.000.000	-
				3 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi sedang/berat	Ruang Kelas	90	90	0	100.000.000	-
				4 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi sedang/berat	Unit	32	10	22	50.000.000	1.100.000.000
				5 Pengadaan Mebeluer Sekolah	5 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	4	4	0	20.000.000	-
				6 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	6 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	830	800	30	500.000	15.000.000
				7 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	11011	11011	0	250.000	-

* D A T A S E L E B I H N Y A B I S A D I L I H A T D I .



FORM 1.C.2 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN
KABUPATEN GRESIK

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2021)	ALOKASI ANGGARAN (2021)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2026			
										2022			2023			2024			2025				2026		
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)		TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Penambahan Ruang Kelas Baru	1 Jumlah penambahan Kelas Baru SD	Ruang	25	5.279.070.825		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2 Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah	2 Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	Lembaga	-	-		10	63	627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	Unit	10	1.783.499.997		10	70	697	11	164	1.804	11	328	3.608	11	338	3.716	11	348	3.828	11
				4 Rehabilitasi Ruang Kelas	4 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi sedang/berat	Ruang Kelas	147	2.019.000.000		80	90	7.174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5 Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	5 Jumlah Perpustakaan SD yang direhab	Ruang	10	1.800.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi sedang/berat	Unit	-	-		-	-	1.980	-	503	-	1.006	-	1.036	-	1.036	-	1.067	-	1.067	-

* D A T A Y A N G S E L E B I H N Y A B I S A D I L I *



2. URUSAN KESEHATAN

NO	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	TARGET PENERIMA PELAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODG) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	WRINGINANOM	KEDUNGANYAR	108	99	33	172	827	5.486	674	148	188	8	64	63
		SUMBERAME	78	78	47	351	970	2.533	320	174	197	11	54	90
		WRINGINANOM	54	99	23	312	627	2.867	496	131	107	8	44	89
		LEBANISUKO	79	63	85	327	446	3.216	463	107	249	13	67	79
		LEBANIWARAS	88	87	39	261	655	3.290	707	102	202	19	45	66
		SUMENGKO	85	94	95	324	114	2.591	647	194	217	6	42	98
		PASINAN LEMAHPUTIH	84	65	76	167	491	4.071	744	188	116	7	97	98
		SEMBUNG	54	55	74	438	752	4.251	507	164	173	11	79	97
		KEPUHKLAGEN	59	47	70	418	718	2.235	729	193	169	5	107	85
		SUMBERWARU	85	80	191	262	897	2.525	438	147	143	7	87	86
		KESAMBENKULON	64	64	96	441	335	2.826	372	143	147	7	42	121
		MONDOLUKU	75	61	50	282	709	3.004	478	144	165	7	25	51
		SUMBERGEDE	90	115	44	280	479	3.260	468	119	147	6	87	48
		SOKO	92	92	86	302	698	3.121	537	187	145	8	83	92
		PEDAGANGAN	55	54	94	130	582	3.128	698	153	160	9	27	90
		DEKATAGUNG	57	51	50	204	459	2.188	409	965	98	5	35	67
		TOTAL	20.014	20.156	20.124	88.337	178.412	908.044	157.292	236.030	48.366	2.369	18.112	28.828

* D A T A Y A N G S E L E B I H N Y A B I S A D I L I R



FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN : GRESIK

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
1	WRINGINANOM	Puskesmas	2	Dokter	6
		Ponkesdes	11	Dokter Gigi	16
				Bidan	5
				Perawat	1
				Nutrisionis	2
				Kesehatan Masyarakat	1
2	DRIYOREJO	Puskesmas	2	Dokter	9
		Ponkesdes	9	Dokter Gigi	2
				Bidan	33
				Perawat	19
				Nutrisionis	3
				Kesehatan Masyarakat	2

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H *



FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN
UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	10.277	10.277	0	391	4.018.307	
		Tablet tambah darah	3.544	3.544	0	21890	77.578.160	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	16.602	16.602	0	788	13.082.376	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	2.800	2.800	0	241500	676.200.000	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	2.214	2.214	0	354900	785.748.600	
		Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	4.427	4.427	0	1130	5.002.510	
		Kartu ibu/rekam medis ibu	19.702	19.702	0		-	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	22.136	22.136	0		-	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Formulir Partograf	21.130	13.859	7271		-	
		Kartu ibu (rekam medis)	21.130	21.130	0		-	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	21.130	21.130	0		-	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Vaksin Hepatitis B0	20.124	20.124	0		-	
		Vitamin K1 injeksi	20.124	20.124	0		-	



FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter	234	234	0	
		Bidan	893	893	0	
		Perawat	1308	1308	0	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter	234	234	0	
		Bidan	893	893	0	
		Perawat	1308	1308	0	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter	225	225	0	
		Bidan	893	893	0	
		Perawat	1308	1308	0	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter	219	219	0	
		Bidan	893	893	0	
		Perawat	1308	1308	0	
		Nutrisionis/Ahli Gizi	99	99	0	
		Kader Kesehatan	7595	7595	0	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dokter/Dokter Gigi	219	219	0	
		Bidan	893	893	0	
		Perawat	1308	1308	0	
		Nutrisionis/Ahli Gizi	99	99	0	

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H .



FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KODE *)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
1	1					Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
	1	02				Urusan pemerintahan bidang kesehatan															
	1	02	02			Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota															



FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KODE *)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
1	1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	1	0				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
	1	0	02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
	1	0	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																
	1	0	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.856	1.558.095.466,00	23.277	3.135.132.215,60	24.277	3.448.645.437,16	25.277	3.793.509.980,88	26.277	4.172.860.978,96	26.277	4.172.860.978,96				DINAS KESEHATAN
	1	0	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.751	326.212.000,00	23.209	4.829.826.100,00	24.209	5.312.808.710,00	25.209	5.844.089.581,00	26.209	6.428.498.539,10	26.209	6.428.498.539,10				DINAS KESEHATAN
	1	0	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18.602	116.746.005,00	22.950	372.532.945,40	23.950	409.786.239,94	24.950	450.764.863,93	25.950	495.841.350,33	25.950	495.841.350,33				DINAS KESEHATAN



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	82.914	856.577.832,00	97.274	1.159.439.358,00	101.274	1.275.383.293,80	105.274	1.402.921.623,18	109.274	1.543.213.785,50	109.274	1.543.213.785,50		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasara	162.652	856.577.832,00	164.659	1.205.817.661,40	174.659	1.326.399.427,54	184.659	1.459.039.370,30	194.659	1.604.943.307,32	194.659	1.604.943.307,32		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Produktif	369.351	940.020.069,00	625.413	1.321.224.583,80	893.447	1.453.347.042,18	893.447	1.598.681.746,40	893.447	1.758.549.921,04	893.447	1.758.549.921,04		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Lanjutan	90.501	495.547.459,00	106.621	595.098.315,90	116.621	654.608.147,49	126.621	720.068.962,30	136.621	792.075.858,46	136.621	792.075.858,46		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Penderita Hipertensi	98.180	145.209.596,00	261.147	362.739.352,80	373.067	399.013.288,08	373.067	438.914.616,89	373.067	482.806.078,58	373.067	482.806.078,58		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Penderita Diabetes Melitus	45.284	149.034.019,00	41.427	353.824.885,70	42.749	389.207.374,27	44.071	428.128.111,70	44.071	470.940.922,87	44.071	470.940.922,87		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2.102	149.750.900,00	2.218	410.077.525,00	2.369	451.085.277,50	2.520	496.193.805,25	2.520	545.813.185,77	2.520	545.813.185,77		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis	16.416	247.369.850,00	7.600	553.577.915,00	7.625	608.935.706,50	7.650	669.829.277,15	7.675	736.812.204,86	7.675	736.812.204,86		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	22.613	288.380.600,00	21.893	518.937.636,80	24.082	570.831.400,48	26.491	627.914.540,53	29.140	690.705.994,58	29.140	690.705.994,58		DINAS KESEHATAN



FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.136	22.136	100	1.551.101.000,00	1.181.824.300,00	76,19	APBD/D AK	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya K1 akses 2. Mobilitas yang tinggi pada bumil; 3. adanya bumil yang pindah kelain tempat; 4. Adanya ibu hamil yang abortus 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan PKK dan kader desa untuk melaporkan ke Bidan Desa apabila mengetahui ada warga yang hamil; 2. Memantau catin baik yang ber KB atau yang tidak ber KB edukasi tentang pentingnya ANC yang rutin; 3. Melakukan promosi Kesehatan terkait Kesehatan selama kehamilan; 4. Melakukan koordinasi lintas serktor untuk integrasi dalam rangka pencapaian SPM
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.130	21.130	100	107.806.000,00	96.188.000,00	89,22	APBD/D AK	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mobilitas ibu hamil yang tinggi; 2. Adanya kehamilan dengan abortus; 3. Adanya persalinan diluar wilayah Kab. Gresik sehingga tidak tercatat pada pelaporan; 4. Pada saat pelaporan SPM masih ada sasaran bumil yang belum waktunya bersalin dan hal tersebut berpengaruh terhadap capaian target 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk data yang digunakan; 2. Melakukan promosi Kesehatan terkait Kesehatan ibuyang dimulai sejak masa kehamilan dan persalinan

* D A T A Y A N G S E L E B I H N Y A B I S A D I



FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.136	22.136	100					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.130	21.130	100					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.124	20.124	100					
4	Pelayanan Kesehatan Balita	83.264	83.264	100					
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	178.412	178.412	100					
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	908.044	908.044	100					
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	157.292	157.292	100					
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	387.782	387.782	100					

* D A T A Y A N G S E L E B I H N Y A B I S A D I L I *



3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

FORM 3.A.3 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN	KONDISI		
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)		BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DRIYOREJO	KRIKILAN	sumur bor						-		-	
2	DRIYOREJO	DRIYOREJO	sumur bor						-		-	
3	DRIYOREJO	CANGKIR	sumur bor						-		-	
4	DRIYOREJO	BAMBE	sumur bor						-		-	
5	DRIYOREJO	MULUNG	sumur bor						-		-	
6	DRIYOREJO	TENARU	sumur bor						-		-	
7	DRIYOREJO	PATIKEN	sumur bor						-		-	
8	DRIYOREJO	KESAMBENWETAN	sumur bor						TIRTO BENING		1377	
9	DRIYOREJO	SUMPUT	sumur bor						-		-	
10	DRIYOREJO	TANJUNGAN	sumur bor						-		250	
11	DRIYOREJO	BANJARAN	sumur bor						-		-	
12	DRIYOREJO	KARANGANDONG	sumur bor						-		-	
13	DRIYOREJO	MOJOSARIREJO	sumur bor						-		106	
14	DRIYOREJO	WEDOROANOM	sumur bor						-		-	

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H .



FORM 3.A.4 KONDISI SPALD
KABUPATEN/KOTA :

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IPLT Betyoguci	Desa Betyoguci, Kecamatan Manyar	Ya	Gresik, Kebomas, Manyar	-	45	-	8,1	-
2	IPAL Lancar Jaya	Tlogobendung, Gresik	Ya	Gresik	Tlogo Bendung	20	50	3,6	9
3	MCK Puloancikan 2	Puloancikan, Gresik	Tidak	Gresik	Puloancikan	20	50	-	-
4	MCK Tlogo Pojok Indah	Tlogopojok, Gresik	Ya	Gresik	Tlogopojok	20	50	20	-
5	IPAL Lancar Jaya 1	Betyoguci, Manyar	Ya	Manyar	Betoyo Guci	15	30	10,5	21
6	IPAL Barokah/ Dragon	Betyoguci, Manyar	Tidak	Manyar	Betoyo Guci	15	30	-	-
7	IPAL Samudera Jaya	Kroman, Gresik	Ya	Gresik	Kroman	15	30	17	34
8	IPAL kali rt 5	Kroman, Gresik	Ya	Gresik	Kroman	15	30	2	4
9	IPAL Kroman TPI	Kroman, Gresik	Ya	Gresik	Kroman	15	30	2,5	5
10	IPAL RPH	Sidokumpul, Gresik	Tidak	Gresik	Sidokumpul	15	30	-	-
11	MCK Al Hidayah	Klampok, Benjeng	Ya	Benjeng	Klampok	20	50	20	-
12	IPAL Cerdas Ceria	Karangpoh, Gresik	Ya	Gresik	Karangpoh	20	50	15,6	39
13	MCK Karangpoh	Karangpoh, Gresik	Ya	Gresik	Karangpoh	20	50	20	-
14	MCK Melati Kejujuran	Bedilan, Gresik	Ya	Gresik	Bedilan	20	50	20	-
15	IPAL Drojokan Indah	Kramat Inggil, Gresik	Ya	Gresik	Kramat Inggil	30	75	10,8	27

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H .



FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLA YANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMB AH	
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UJUNGPAKKAH	CANGAAN	RT 01	RW 02	DEWI ARSANI	3525075606680001	-	1	-	1	-	-	-	< 10 M
2	UJUNGPAKKAH	CANGAAN	RT 01	RW 02	NUR HALIMAH	3525074801840001	-	1	-	1	-	-	-	< 10 M
3	UJUNGPAKKAH	CANGAAN	RT 01	RW 02	SYAIKHUL MA ARIF	3525071608760001	-	1	-	1	-	-	-	< 10 M
4	UJUNGPAKKAH	CANGAAN	RT 02	RW 07	MASYHUDI	3525070606860001	-	1	-	1	-	-	-	< 10 M
5	UJUNGPAKKAH	CANGAAN	RT 02	RW 07	NURUL KHUSNI	3525072404850001	-	1	-	1	-	-	-	< 10 M
6	UJUNGPAKKAH	CANGAAN	RT 02	RW 07	BADRUL TAMAM	3525071903970001	-	1	-	1	-	-	-	< 10 M
7	UJUNGPAKKAH	CANGAAN	RT 02	RW 07	MOH. SHOLIH	3525070903720003	-	1	-	1	-	-	-	< 10 M
8	UJUNGPAKKAH	CANGAAN	RT 02	RW 07	MIFTAKHUL ULUM	3525070509820001	-	1	-	1	-	-	-	< 10 M
9	UJUNGPAKKAH	CANGAAN	RT 02	RW 07	NUR SYAMSI	3525072003670001	-	1	-	1	-	-	-	< 10 M
10	UJUNGPAKKAH	CANGAAN	RT 02	RW 07	SUKAYAH	3525075410570001	-	1	-	1	-	-	-	< 10 M

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H *



FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD
KABUPATEN/KOTA :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KEPADA TAPAN PENDUK (jawa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES LAYAK			AKSES AMAN SPALD-S		AKSES AMAN SPALD-T		
											MBR	NON MBR	BABS	CUBLUK (PERKOTAAN)	CUBLUK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MC	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	IPAL DPERMUKIMAN	IPAL D KAWASANTERTUN	IPAL D PERKOTAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Bungah	Melirang	-	-		Perkotaan	3	Ida Yuliatin		4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Bungah	Melirang	-	-		Perkotaan	3	Imron		4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Bungah	Melirang	-	-		Perkotaan	3	Kairi		4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Bungah	Melirang	-	-		Perkotaan	3	Arifin		4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Bungah	Melirang	-	-		Perkotaan	3	Fadilla		4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Bungah	Melirang	-	-		Perkotaan	3	Musri		1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Duduksampeyan	Panjunan	-	-	-	Perdesaan	-	Sripah	-	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Duduksampeyan	Panjunan	-	-	-	Perdesaan	-	Jaiyah	-	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I :



FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA : GRESIK 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA	AKSI
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)		
1	2	2	3	4		6	7	8	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10	Liter/ Detik	-	-	DCKPKP Kab.Gresik	
2	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	10	Liter/ Detik	-	-	DCKPKP Kab.Gresik	
3	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	4219	SR	-	-	DCKPKP Kab.Gresik	
4	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	2050	Unit			DCKPKP Kab.Gresik	
5	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan, Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	12	SR			DCKPKP Kab.Gresik	

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA : GRESIK 2023



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA	AKSI
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	5	Rumah Tangga			DCKPKP KAB.GRESIK	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	10	Rumah Tangga			DCKPKP KAB.GRESIK	
3	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	143	Unit	Kab.Gresik	650.003.583	DCKPKP KAB.GRESIK	
4	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	10	Rumah Tangga			DCKPKP KAB.GRESIK	
5	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	300	Rumah Tangga	Kab.Gresik	300.000.000	DCKPKP KAB.GRESIK	
6	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	10	M ³ /Hari			DCKPKP KAB.GRESIK	



FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
1	Benjeng	Deliksumber	105	105		
2	Benjeng	Mungguembang	106	106		
3	Bungah	Melirang	73	73		
4	Bungah	Sidomukti	19	19		
5	Cerme	Kambingan	93	93		
6	Cerme	Kemudi		103		
7	Duduksampeyan	Sumari	974	974		
8	Duduksampeyan	Glanggang	97	97		
9	Duduksampeyan	Kawistowindu	221	221		
10	Duduksampeyan	Petis Benem	819	819		
11	Duduksampeyan	Wadak Kidul	645	645		
12	Duduksampeyan	Wadak Lor	230	230		
13	Duduksampeyan	Sumengko	631	631		
14	Duduksampeyan	Duduksampeyan	1041	1041		
15	Duduksampeyan	Kramat	100			
16	Dukun	madumulyorejo	100	100		
17	Dukun	Bulangan	105	105		
18	Dukun	Bangeran	98	98		
19	Menganti	Sidowungu	97	97		
20	Menganti	Pengalangan	93	93		
21	Panceng	Campurejo	45	45		
22	Panceng	Sukodono	82	82		
23	Sidayu	Asempapak	94	94		
24	Sidayu	Racikulon	100	100		
25	Sidayu	Randuboto	54	54		
26	Ujungpangkah	Cangaan	97	97		
27	Ujungpangkah	Ketapang Lor	95	95		
28	Ujungpangkah	Sekapuk	43	43		
29	Wringinanom	Mondoluku	104	104		
30	Wringinanom	Pasinan Lemahputih	26	26		
31	Wringinanom	Wringinanom	49	49		
32	Driyorejo	Wedoroanom	309	309		
33	Driyorejo	Sumput	152	152		
34	Driyorejo	Bambe	104	104		



FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				
			TOTAL	AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD- S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Balongpanggung	Dohoagung	1		1					1	
2	Balongpanggung	Kedungpring	1		1					1	
3	Benjeng	Banter	1		1					1	
4	Bungah	Melirang	6	6					6		
5	Bungah	Bungah	125			125					125
6	Bungah	Kisik	1		1					1	
7	Bungah	Sunonlegowo	1		1					1	
8	Cerme	Banjarsari	14		14					14	
9	Cerme	Betiting	1		1					1	
10	Cerme	Cerme Kidul	2		2					2	
11	Cerme	Ngabetan	2		2					2	
12	Cerme	Padeg	1		1					1	
13	Driyorejo	Banjaran	1		1					1	
14	Driyorejo	Mulung	1		1					1	
15	Duduksampeyan	Panjunan	5	5					5		
16	Duduksampeyan	Tumapel	5	5					5		
17	Duduksampeyan	Tambakrejo	8	8					8		



18	Duduksampeyan	Ambeng-ambeng Watangrejo	1		1					1	
19	Duduksampeyan	Duduksampeyan	1		1					1	
20	Duduksampeyan	Sumari	1		1					1	
21	Dukun	Dukunanyar	1		1					1	
22	Dukun	Sembunganyar	1		1					1	

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 5 0 B I S A D I L I H .



4. URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Banjir	Sedang	Balongpanggung	Jombangdelik										
2	Banjir	Sedang	Balongpanggung	Brangkal										
3	Banjir	Sedang	Balongpanggung	Ngampel										
4	Banjir	Sedang	Balongpanggung	Tanahlandean										
5	Banjir	Tinggi	Balongpanggung	Dapet										
6	Banjir	Diisi nomor urut	Balongpanggung	Sekarputih										
7	Banjir	Tinggi	Balongpanggung	Pucung										
8	Banjir	Tinggi	Balongpanggung	Wotansari										



9	Banjir	Tinggi	Balongpanggung	Banjaragung															
10	Banjir	Tinggi	Benjeng	Lundo															
11	Banjir	Tinggi	Benjeng	Sedapurklagen															
12	Banjir	Tinggi	Benjeng	Deliksumber															
13	Banjir	Tinggi	Benjeng	Kedungrukem															
14	Banjir	Sedang	Benjeng	Klampok															

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H .



FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA : Gresik

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Sangkapura	Daun	4	2	1	1	4	-	-
2	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Sangkapura	Sungairujing	3	2	-	1	3	-	-
3	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Sangkapura	Dekatagung	4	1	2	1	4	-	-
4	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Sangkapura	Balikterus	1	1	-	-	1	-	-
5	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Tambak	Pekalongan	1	-	-	1	1	-	-



FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA : Gresik

NO.	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Relokasi perumahan di Daerah Sempadan Sungai	Sidayu	Randuboto		28	28	28		28	
2	Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Sidayu	Randuboto		12	12	12		12	



FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA

No	Lokasi		Luas Lahan (Ha)	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah KK	Kondisi Ekonomi (unit rumah)		Status Kepemilikan Tanah (unit rumah)	
	Kecamatan	Kelurahan/Desa				MBR	Non MBR	Legal	Illegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CERME	Guranganyar	1,00	25					
2	BALONGPANGGANG	Banjaragung	7,71	193					
3	BALONGPANGGANG	Brangkal	17,18	430					
4	BALONGPANGGANG	Dapet	13,29	332					
5	BALONGPANGGANG	Jombangdelik	6,95	174					
6	BALONGPANGGANG	Karangsemanding	2,96	74					
7	BALONGPANGGANG	Ngampel	4,48	112					
8	BALONGPANGGANG	Pucung	1,83	46					
9	BALONGPANGGANG	Sekarputih	4,18	104					
10	BALONGPANGGANG	Wotansari	7,42	185					



11	BENJENG	Bengkelolor	6,44	161					
12	BENJENG	Bulangkulon	13,31	333					
13	BENJENG	Bulurejo	7,16	179					
14	BENJENG	Deliksumber	2,81	70					
15	BENJENG	Gluranploso	4,59	115					
16	BENJENG	Lundo	9,04	226					
17	BENJENG	Munggugianti	1,96	49					
18	BENJENG	Sedapurklagen	4,10	102					
19	CERME	Banjarsari	2,33	58					
20	CERME	Gedangkulut	1,18	29					

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 5 0 B I S A D I L I H .



FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gresik	Bedilan	3,51	64	64	Sedang	
2	Gresik	Gapurosukolilo	3,22	118	118	Sedang	
3	Gresik	Kebungson	3,16	224	224	Sedang	
4	Gresik	Kroman	1,95	362	362	Sedang	
5	Gresik	Lempur	4,17	106	106	Sedang	
6	Gresik	Pekauman	3,02	258	258	Sedang	
7	Gresik	Sidokumpul	1,49	143	143	Sedang	
8	Gresik	Tlogobendung	4,38	287	287	Sedang	
9	Gresik	Trate	0,49	47	47	Sedang	
10	Manyar	Sukomulyo	10,05	388	388	Sedang	



FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
									MBR	NON MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDISEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Relokasi Daerah Sempadan Sungai	Sidayu	Randuboto	1	7	16	16	52	16	-	16	-	-	-	16	-
2	Relokasi Daerah Sempadan Sungai	Sidayu	Randuboto	2	7	12	12	44	12	-	12	-	-	-	12	-
3	Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Sidayu	Randuboto	1	7	3	3	10	3	-	3	-	-	-	3	-



4	Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Sidayu	Randu boto	2	7	9	9	35	9	-	9	-	-	-	9	-
Total *)						40	40	141	40	-	40	-	-	-	40	-



FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
KABUPATEN/KOTA : Gresik

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				RENCANA TAHUNAN PEMENUHAN SPM	
											MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDIAN SEWA	RELOKASI/PEMBANGUNAN		BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Tambak	Pekalongan	-	-	-	Zahiro	3525184708640002	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Sangkapura	Daun	-	-	-	Niksen	3525170502750001	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
3	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Sangkapura	Daun	-	-	-	Asadah	3525176506670001	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Banjir, Longsor,	2023	Sangkapura	Daun	-	-	-	Ma'ruf	3525173006600024	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-



FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA
BENCANA
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data		Rp19.921.220
	1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp0
		1. Data Wilayah Administrasi Penanganan	Orang* Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp19.921.220
		1. Pemetaan	1 Orang* 9 Hari + 1 Orang* 7 Hari + 5 Orang* 4 Hari + 2 Orang* 3 Hari + 1 Orang* 2 Hari + 1 Orang* + 1 Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp2.367.750
	1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	30 Orang* 3 kali
		Transportasi	0 Orang* 0 kali
		Penggandaan Materi	0 Eks
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp. 150.000.000
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali



		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp. 150.000.000
H.	Pembangunan Kembali		Rp 50.000.000



FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA : Gresik

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUA SBANGUNAN (M ²)	LUA S TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN		
									MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GAN T I A S E T	SU B S I D I S E W A	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	SIDAYU	RANDUBOTO	1	7	PUTRI NURLITA FEBRIYANTI	3525096305090001	1	1				1		1					1
2	2	SIDAYU	RANDUBOTO	1	7	ZAINAB	3525094411550001	2	1				1		1					1
3	2	SIDAYU	RANDUBOTO	1	7	MOH. TARMUDHI	3525090307800002	1	1		35		1		1					1
4	2	SIDAYU	RANDUBOTO	1	7	MOHAMMAD CHOLID	3525091403680001	3	1				1		1					1
5	2	SIDAYU	RANDUBOTO	1	7	AHMAD FATIH FALAHUDIN AL WAHYUDI	3525090304990002	1	1				1		1					1
6	2	SIDAYU	RANDUBOTO	1	7	ASIKIN	3525090309700001	1	1				1		1					1
7	2	SIDAYU	RANDUBOTO	1	7	UBAIDILLAH S.PDI	3525091203620004	5	1		67,5		1		1					1



8	2	SIDAYU	RANDUBOTO	1	7	MOHAMMAD SALI	35250901068 40002	4	1				1		1					1
---	---	--------	-----------	---	---	---------------	----------------------	---	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	---

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H .



FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : Gresik

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp 2.274.200.000
	4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah	
		Biaya konstruksi	Rp 2.274.200.000
		Biaya MK	Rp
	5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah	
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
		Penggandaan dokumen	Eks



FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA : Gresik

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN								
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Rehabilitasi	10	150.000.000	150.000.000								
2	Pembangunan kembali	1	50.000.000	50.000.000								
3	Penyediaan rumah relokasi											
	a. Pengadaan lahan	-	-	-								
	b. Pembangunan baru	2	100.000.000	100.000.000								
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-								
Jumlah *)		13	300.000.000	300.000.000								



FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
KABUPATEN/KOTA : Gresik

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				TAHUN Ke-N		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	-	-			
2	Subsidi uang sewa	-	-			
3	Penyediaan rumah layak huni	40	2.274.200.000		2.274.200.000	
Jumlah *)		40	2.274.200.000		2.274.200.000	



FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA : Gresik

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI				
					TOTAL	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Tambak	Pekalongan	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
2	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Sangka pura	Daun	4	2	1	1	3	1	-	-	3	1	-	-	-
3	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Sangka pura	Sungarujing	3	2	-	1	2	-	1	-	2	-	1	-	-
4	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Sangka pura	Dekatagung	4	1	3	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

5	Banjir, Longsor, Pergerakan Tanah dan Rob	2023	Sangka pura	Balikterus	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Total *)					13	6	4	3	10	1	2		10	1	2		
Persentase layanan **)													76,9	7,7	15,4		
Capaian SPM Total ***)													100,0				



FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA : Gresik

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				
				TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI	
				(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai	Sidayu	Randuboto	28			28			28		
2	Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Sidayu	Randuboto	12			12			12		
Total *)				40			40			40		
Persentase Layanan **)								100%				
Capaian SPM Total ***)								100%				





**FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA: Gresik**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
			SUDAH TERLAYA NI	BELUM TERLAYA NI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	13	13		100%
2	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	40	40		100%



PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4
1	Rumah Ibadah	NIHIL	NIHIL
2	Sekolah	NIHIL	NIHIL
3	Jembatan	NIHIL	NIHIL
4	Rumah warga negara	NIHIL	NIHIL
5	Kendaraan yang dimiliki oleh WN	NIHIL	NIHIL
	Dsb		



PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	Roda 4	21	21	0
2	Roda 2	22	20	2
3	Sepeda Gunung	2	2	0



FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	111	133	8	10



FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1418	5	1	- Pajak reklame/perizinan yang masih belum bisa diakses secara online menyulitkan pada saat kegiatan penertiban
					- Saat penertiban PKL, kami kesulitan untuk memberikan tempat relokasi
					- Saat terlalu banyak mendapat tangkapan, tempat yang disediakan dinsos tidak cukup menampung dan anggaran untuk



					mamin yang terbatas



FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA
DALAM RADIUS 0-50 METER

PROVINSIDANKABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1		3	4	5	6
1.	Pelayanan Pengobatan	0	0	-	-



FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA
DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6
1	WARUNG NASI	0	0	0	0
2	WARUNG NASI KOPI	0	0	0	0
3	KIOS	0	0	0	0
4	WARUNG	0	0	0	0
5	RUMAH	0	0	0	0



FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN TRANTIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP			
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)	(PPNS) Semakin banyak permasalahan/pelanggaran perda yang ada di Kabupaten Gresik dikarenakan tidak tertangani dengan tepat oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Satpol PP) Apabila pelatihan dasar/uji kompetensi tidak dilakukan akan menghambat pangkat dan pengetahuan personil.	(PPNS) 6 Orang (Satpol) 300 Orang	(PPNS) Masih sedikit jumlah PPNS di Satpol PP sehingga perlu diperbanyak lagi PPNS agar pelanggaran perda/perbup dapat tertangani dengan tepat.
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP	Pekerjaan tidak terlaksana dengan optimal	6 Mobil	Untuk kegiatan operasional Satpol PP
4		Pelayanan Perbaikan Materil			



5	Pelayanan Pengobatan			
6	Kebutuhan lainnya			



FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
1	2	3	4	6	7
1	Petunjuk teknis SOP penegakan peraturan daerah				
2	Petunjuk teknis SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat				
3	Petunjuk teknis SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa				
4	Petunjuk teknis SOP pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting				
5	Petunjuk teknis SOP pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting				
6	Petunjuk Teknis SOP pelaksanaan operasional patroli				
7	Tata cara pelaksanaan operasional penyidik pegawai negeri sipil daerah dalam penegakan peraturan daerah				



--	--	--	--	--	--



FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	52	30	4000000	328000000	8	6	25000000	150000000	376	130000	48880000



FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	MINIBUS	21	27	6	276.000.000	1.656.000.000
2	SEPEDA MOTOR	22	22	0		
3	SEPEDA ANGIN	2	2	0		
4						



FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR
WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGOBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketentraman dan Ketertiban Umum								



FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN
KERANGKA PENDANAAN

KABUPATEN/KO

TA :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	300000000	DAU	
				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda danPerkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	Laporan	150000000	DAU	



				Rasa dan Kerusuhan Massa	Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	470000000	DAU	
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	100000000	DAU	
			Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	Laporan	1100000000	DAU & DBHCH T	



					Masyarakat/Pelaku Usaha				
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	80000000	DAU	
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	809469500	DAU & DBHCH T	
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Laporan	50000000	DAU	



					Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				



FORM 5.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1560000000	DAU	



FORM 5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	1.656.000.000	DAU	



FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM
WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA

KABUPATEN/KOTA:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat dari penegakan perda dan perkada										



FORM 5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

KABUPATEN/KOTA:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah anggota Satpol-PP	orang	300	3404400000	252	3052300000	84%	90%	DAU		
	Jumlah PPNS Kabupaten yang Pembinaan										



FORM 5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

KABUPATEN/KOTA:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit	6	1656000000	0	0	0	0	DAU		



FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



6. Bidang Kebencanaan

FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

POVINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN/KOTA : KAB. GRESIK

TAHUN ANGGARAN : 2023

NO.	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/ tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR AN
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108913		SAIFUL BACHKRI	3515111405880006		L	SIDOARJO	14 May 1988	TERUNG KULON, RT:003, RW:001	GEDANGKULUT	CERME	Tidak Mampu / Rentan			
108914	IKHWAN	IKHWAN	3525112701820023	3525110102210004	L	GRESIK	27 Jan 1982	SAWAHAN, RT:003, RW:008	GEDANGKULUT	CERME	Tidak Mampu / Rentan			
108915		FAIZATUL SEPTIANI	3525046909950001		P	GRESIK	29 Sep 1995	SAWAHAN, RT:003, RW:008	GEDANGKULUT	CERME	Tidak Mampu / Rentan			
108916		NAYRA KHANZAH PUTRI MAULIDIAH	3525116911180001		P	GRESIK	29 Nov 2018	SAWAHAN, RT:003, RW:008	GEDANGKULUT	CERME	Tidak Mampu / Rentan			
108917		WIWIK SUGIARTI	3525114903990002		P	GRESIK	09 Mar 1999	GEDANG KULUT, RT:003, RW:004	GEDANGKULUT	CERME	Tidak Mampu / Rentan			
108918		MUHAMMAD RENDY AZHARUDIN	3525112711170002		L	GRESIK	27 Nov 2017	GEDANG KULUT, RT:003, RW:004	GEDANGKULUT	CERME	Tidak Mampu / Rentan			



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

108919	ALFIAN	ALFIAN	3525111002 920001	3525110107210 002	L	GRESI K	10 Feb 1992	GEDANG KULUT, RT:001, RW:003	GEDANGKU LUT	CERME	Tidak Mampu / Rentan			
108920	ARIFIN	ARIFIN	3525040505 770008	3525110108180 004	L	GRESI K	05 May 1977	JENGGOLOK, RT:003, RW:001	GEDANGKU LUT	CERME	Fakir Miskin			
108921		HEVI KURNIAWATI	3525045705 870001		P	GRESI K	17 May 1987	JENGGOLOK, RT:003, RW:001	GEDANGKU LUT	CERME	Fakir Miskin			

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H .



FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

DATA DASAR WARGA NEGARA								JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL									NOMOR VARIASI KELOMPOK KERAWANAN	PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA			
NO	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	GEMPABUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANGAN LAUT EKSTREM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	EPIDEMIDAN WABAH		WARGA NEGARA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENANGANI SUBURUSAN BENCANA	PETUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA																			
108913		SAIFUL BACHKRI	35151114 05880006		L	GEDAN GKULUT	CERME								√				√		
108914	IKHWAN	IKHWAN	35251127 01820023	35251101 02210004	L	GEDAN GKULUT	CERME								√				√		
108915		FAIZATUL SEPTIANI	35250469 09950001		P	GEDAN GKULUT	CERME								√				√		
108916		NAYRA KHANZAH PUTRI MAULIDIAH	35251169 11180001		P	GEDAN GKULUT	CERME								√				√		



FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : PADANG

TAHUN ANGGARAN : 2020

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN									TOTAL		
			VARIASI 1			VARIASI 2			VARIASI n			KK	JIWA	
			KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	$13 = 5+8+11$	$14 = 6+9+12$	
1	Balongpanggung	Banjaragung	Banjir		780									780
2		Wotansari	Banjir		762									762
3		Sekarputih	Banjir		883									883
4		Pucung	Banjir		731									731
5		Ngampel	Banjir		789									789
6		Tanahlandean	Banjir		774									774
7		Klotok	Banjir		730									730
8		Tenggor	Banjir		964									964
9		Dohoagung	Banjir		688									688
10		Pinggir	Banjir		1025									1025
11	Benjeng	Sedapurklagen	Banjir		984									984

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H .



FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA:

TAHUN ANGGARAN:

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG)					JUMLAH WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN					KETERAN GAN	
			PNS	TNI	POLRI	SATLINMAS	TENAGA KONTRAK	WARGA NEGARA		KERENTANAN				
								JIWA	KK	KONDISI EKONOMI MISKIN (KK)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ORANG)	KELOMPOK RENTAN (ORANG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Balongpanggung	Banjaragung						780						
2		Wotansari						762						
3		Sekarputih						883						
4		Pucung						731						
5		Ganggang						872						
6		Ngasin						1719						
7		Ngampel						789						
8		Tanahlandean						774						
9		Klotok						730						
10		Tenggor						964						
11		Dohoagung						688						
12		Pinggir						1025						
13		Pacuh						1634						



* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H .



FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

DATA DASAR PETUGAS														STATUS PETUGAS						SER TIFI- KASI YAN G DIMI LIKI	PENUGASA N			LOKASI PENUGA SAN		K E T
NO	NAMA LENGKAP	N I K	N O M O R K K	JEN IS KEL AMI N (L/P)	TE MP AT LA HIR	TANGG AL LAHIR (DD/MM/ YYY Y)	A L A M A T	DESA /KEL URAH AN	KEC	KONDIS I EKONO MI (MISKIN /TIDAK MISKIN)	BER KEB UTU HAN KHU SUS (YA/ TIDA K)	JENIS KEBU TUHA N KHUS US (Jika YA)	KELO MPO K UMU R REN TAN	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR		PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	POSKO	POS LAPANGAN	
1	Jaenal Abidin			L				Banjaragung	Balongpanggung	Tidak Miskin	Tidak	Tidak	Tidak						√		√	√				
2	Nasir			L				Pucung	Balongpanggung	Tidak Miskin	Tidak	Tidak	Tidak						√		√	√				
3	Nurul Aini			P				Karangsemanding	Balongpanggung	Tidak Miskin	Tidak	Tidak	Tidak						√		√	√				
4	Mu'alim			L				Sekarputih	Balongpanggung	Tidak Miskin	Tidak	Tidak	Tidak						√		√	√				
5	Kasman			L				Wotan sari	Balongpanggung	Tidak Miskin	Tidak	Tidak	Tidak						√		√	√				



FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

TAHUN ANGGARAN :

NO	JENIS BENCANA	PENDUDUK			PETUGAS (ORANG)					TOTAL WAJIB LATIH (ORANG)
		JIWA	KK	DESA	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS TRC KLB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI	JUMLAH PETUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4 + 10
1	Banjir	789	263	Ngampel	100		40	5	145	34.584
2	Banjir	774	262	Tanahlandea n						
3	Banjir	730	235	Klotok						
4	Banjir	964	329	Tenggor						
5	Banjir	688	236	Dohoagung						
6	Banjir	1.025	323	Pinggir						
7	Banjir	1.292	422	Karangan kidul						
8	Banjir	1.276	392	Kedungsekar						
9	Banjir	793	254	Dermo						



10	Kekeringan	1.908	533	Gedangkulut						
11	Banjir	1.818	510	Wedani						
12	Banjir	2.969	920	Dalegan						
13	Banjir	2.207	692	Petung						
14	Banjir	2.460	709	Bungah						
15	Banjir	2.467	761	Tanjungwido ro						
16	Banjir	2.290	684	Kramat						
17	Banjir	1.655	463	Cangaan						
18	Banjir	5.027	1.539	Banyuurip						
19	Tanah Longsor	1.589	417	Gunungteguh						
20	Banjir	1.718	442	Gelam						

FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN



NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH/ SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT					LOKASI		KONDISI	
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGAN AN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobil Rescue ranger	1	√					Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	√	
2	Mobil Rescue anti banjir	1	√					Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	√	
3	Truk serbaguna	1	√					Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	√	
4	Mobil Tangki Air	5					√	Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	√	
5	Pick up	2	√				√	Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	√	
6	Spd Motor Traill	9	√					Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	√	
7	HT	11	√					Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	√	
8	RIG	8	√					Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	√	
9	GPS	2	√					Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	√	
10	Repiter / antena	2	√					Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	√	
11	Alat Pemotong Baja	1	√					Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	√	



* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H .



FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH/ SATUAN	LOKASI		KONDISI	
			POSISI	INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7
1	Paket Sembako	4000	Kantor BPBD Kab. Gresik	BPBD Kab. Gresik	4000	



FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :
KEJADIAN BENCANA :
LOKASI :
TANGGAL KEJADIAN :

NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MOHAMAD YUSUP SANTOSO	3525041610810005	3525040107210004	L	NGANJUK	16 Oct 1981	BENGKELO KIDUL, RT:009, RW:004	GLURANP LOSO	BENJENG	Fakir Miskin			
2	MUGIARTI	3525045405830003		P	GRESIK	14 May 1983	BENGKELO KIDUL, RT:009, RW:004	GLURANP LOSO	BENJENG	Fakir Miskin			
3	NYUSRIL FERDI NUGROHO	3525042009060002		L	GRESIK	20 Sep 2006	BENGKELO KIDUL, RT:009, RW:004	GLURANP LOSO	BENJENG	Fakir Miskin			
4	SATRIA DWI FEBRIAN	3525040402130003		L	GRESIK	04 Feb 2013	BENGKELO KIDUL, RT:009, RW:004	GLURANP LOSO	BENJENG	Fakir Miskin			



5	SISKA RETNO WULANDARI	35250457 04010005	35250401 08190001	P	GRESIK	17 Apr 2001	BENGKELO KIDUL, RT:008, RW:004	GLURANP LOSO	BENJ ENG	Tidak Mampu / Rentan			
---	--------------------------	----------------------	----------------------	---	--------	-------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------	-------------------------	--	--	--

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 5 0 B I S A D I L I H .



FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :
KEJADIAN BENCANA :
LOKASI :
TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR WARGA NEGARA							STATUS					PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA					
NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KORBAN			PENGUNSI		WAR GA NEGA RA RAWA N BENC ANA	APARA TUR YANG MENAN GANI SUB URUSA N BENCA NA	PETUGAS			
							M E N I N G G A L	H I L A N G	BUTUH BANTUAN MEDIS DARURAT	BUTUH BANTUAN MEDIS LANJUT	S E L A M A T			PETU GAS TRC KLB	PE TU GAS TRC PDB	PET UGAS PPE	PET UGA S OPE RASI
1	2	3	4	5A	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MOHAMAD YUSUP SANTOSO	3525041610810005	3525040107210004	L	GLURANPLOSO	BENJENG					√	√	√		√	√	√
2	MUGIARTI	3525045405830003		P	GLURANPLOSO	BENJENG					√	√	√		√	√	√
3	NYUSRIL FERDI NUGROHO	3525042009060002		L	GLURANPLOSO	BENJENG					√	√	√		√	√	√
4	SATRIA DWI FEBRIAN	3525040402130003		L	GLURANPLOSO	BENJENG					√	√	√		√	√	√



5	SISKA RETNO WULANDARI	35250457 0401005	35250401 08190001	P	GLURANPLOSO	BENJENG					v	v	v			v	v	v
---	--------------------------	---------------------	----------------------	---	-------------	---------	--	--	--	--	---	---	---	--	--	---	---	---

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 5 0 B I S A D I L I H .



FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :
KEJADIAN BENCANA :
LOKAS :
TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR PETUGAS										STATUS PETUGAS						SERTIFIKASI YANG DIMILIKI	PENUGASAN				LOKASI PENUGASAN		
NO.	NAMA PETUGAS	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR		PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT	POSKO	POS LAPANGAN	
																						KEC.	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Jaenal Abidin			L				Banj aragung	Balongpan ggang						√			√			√		
2	Nasir			L				Pucung	Balongpan ggang						√			√			√		
3	Nurul Aini			P				Karangse manding	Balongpan ggang						√			√			√		



* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 5 0 B I S A D I L I H .



FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN (DD/MM/YYYY)	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENIT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENIT)	LOKASI	STATUS DARURAT BENCANA		
						TIDAK DIKELUARKAN	DIKELUARKAN	
							DIKELUARKAN <24JAM	DIKELUARKAN >24 JAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angin Kencang		Januari		TEBALOAN			√
2	Angin Kencang		Januari		GREDEK			√
3	Angin Kencang		Januari		GEDANGKULUT			√
4	Angin Kencang		Januari		WEDANI			√
5	Angin Kencang		Januari		DUNGUS			√
6	Angin Kencang		Januari		DADAPKUNING			√
7	Angin Kencang		Januari		KANDANGAN			√
8	Angin Kencang		Januari		PRANTI			√
9	Angin Kencang		Januari		BETON			√
10	Angin Kencang		Januari		CERMEN			√

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 5 0 B I S A D I L I H .



FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				KEBU- TUHAN	KETE- RSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN (x Rp.1000)	KEBUTUHAN BIAYA (x Rp.1000)
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/ PETUGAS	D E S A					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12- 13	15	16 = 14 x 15



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Masyarakat di daerah rawan bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	137.763												59.251.400
---	--	---	---	------------------------------------	---	-------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

* D A T A L E N G K A P B I S A D I L I H A T D I A P . .



FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

TAHUN ANGGARAN :

N O.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARURAT BENCANA n					TOTAL KEBUTUHAN			
							TARGET KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN/ SUDAH TERPENUHI	USULAN PEMENUHAN		HARGA SATUAN (xRp.1000)	JUMLAH BIAYA (xRp.1000)	FISIK	ANGGARAN
							Volume	Kuantitas	Volume	Volume	Kuantitas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 8 - 10	12 = 9	13	14=11X12X13	15= Σ(USULAN PEMENUHAN)	16= Σ(JUMLAH BIAYA)



1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Masyarakat terdampak bencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	3												198.652.000
---	--	--	---	------------------------------	---	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------



3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Masyarakat terdampak bencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1												48.000.000
---	--	--	---	------------------------------	---	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------



FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI :

ABUPATEN/KOTA :

TAHUN ANGGARAN :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR 5 TAHUN							
							WARGA NEGERA	KK	APARAT/PETUGAS	DESA				TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5			Target	Jumlah Biaya (xRp.1000)	
														Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15X16	18	19	20=18X19	21	22	23=21X22	24	25	26=24X25	27	28	29=27X28	30=15+18+21+24+27	31=17+20+23+26+29	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	Masyarakat di daerah rawan bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	Orang	13763					59.251.400																			



		Kawasan Tempat Tinggalnya		Kawasan Tempat Tinggalnya																																	
--	--	------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* D A T A L E N G K A P B I S A D I L I H A T D I A P . . .



FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		CAPAIAN MUTU LAYANAN (%)	BOBOT KEPENTINGAN (%)	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DATA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	FISIK	KEUANGAN			PROGRES KINERJA KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	PROGRES CAPAIAN (%)	TOTAL PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10/8	13 = 11/9	14	15	16 = $\bar{X}(12+13+14)$	17 = $\Sigma(15 \times 16)$	18 = $\bar{X}(12+14)$	19 = $\Sigma(15 \times 18)$	20	21	22
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Masyarakat di daerah rawan bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	137.763	59.251.400	137.763	58.730.800	100%	99,12%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD		



FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGLATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENEMAMAN SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARURAT				RATENCA	NAN			CAPAIAN RATA-RATA (%)			BOBOT KEPENTINGAN	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI				
							TARGET			REALISASI			KOE FISI ENDIKATOR LAYANAN (1/0)	CAPAIAN %			FISIK		KEUANGAN	MUTU LAYANAN	PROGRES KINERJA KELUAR AN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)				PROGRES CAIPAN KE LUARAN (%)	TOTAL PROGRES CAIPAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)		
							VOLUME	KUANTITAS	HARGA	VOLUME		KUANTITAS		HARGA	JUMLAH BIAYA (xRp.1000)	VOLUME												KUANTITAS	HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8X9X10	12	13	14	15=12X13X14	16	17=(12X13)/(8X9)X100%	18=(15/11)X100%	19	20 = X (Capaian Fisik)	21 = X (Capaian Keuangan)	22 = X (Capaian Mutu Layanan)	23	24= X(20+21+22)	25 = Σ(23X24)	26 = X(20+21)	27= Σ(23X26)	28	29	30



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatk an Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Mas yara kat terd amp ak ben can a	Juml ah Korb an Benc ana yang Men dapa tkan Distr ibusi Logis tik Peny elam atan dan Evak uasi Korb an Benc ana	Ora ng	38 1.4 21	1.305 .625. 625	38 1.4 21	624.9 83.05 0	100 %	47,87	1 0 0 %	10 0 %	47, 87	10 0%	100 %	100 %	100 %	100 %	A P B D
--	---	--	--	--	-----------	-----------------	-----------------------	-----------------	---------------------	----------	-------	------------------	--------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPD B yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Masyarakat terdampak bencana	SK Penerimaan Status Darurat Bencana dan SKPD B yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1		48.00 0.000	1		1.650. 000		100 %	3,44	1 0 0 %	10 0 %	3,4 4	10 0%		100 %	100 %	100 %	100 %	A P B D		
--	--	--	------------------------------------	---	---------	---	--	----------------	---	--	---------------	--	----------	------	------------------	--------------	----------	----------	--	----------	----------	----------	----------	------------------	--	--

7. Bidang Pemadam Kebakaran



FORM 5.A.1 FORMAT DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM

KABUPATEN/KOTA : TAHUN :

N O.	PROVINSI KABUPATE /KOTA	BENTUK KELEMBAGAAN				JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	BESARAN APBD	ALOKASI APBD UNTUK SUB URUSAN KEBAKARAN	JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN						JUMLAH PETUGAS				JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN				
		DINAS	SAT POL PP	BP BD	TI PE					MOBI L DAM KAR	MOB IL TAN GKI	MOBI L TANG GA	MOBI L RES CUE	MOBI L LAIN NYA	TAND ON AIR/ GRO UND TANK	PN S	JABATA N/ KUALIFI KASI	NO N PN S	JABATA N/ KUALIFI KASI	RELAW AN KEBAKA RAN	20 17	20 18	20 19	20 20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Gresik	dinas	-	-	C	1.291.518	1.191,25 Km ³	Rp 8.735.650.830	Rp 3.554.471.586	7	6	0	0	3	4	28	0	90	0	458	-	-	-	-



FORM 5.A.2 DAFTAR RELAWAN KABUPATEN/KOTA

DATA RELAWAN DAMKAR 2023

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN	ALAMAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Achmad Hadi	Laki-Laki			Jl. Pahlawan Gang IX/10 Gapurosukolilo	Gresik
2	Muhammad Zainul Abidin	Laki-Laki			Jl. Maulana Malik Ibrahim 7/12 Gapurosukolilo	Gresik
3	Budi Suwarno	Laki-Laki			Jl. Usman Sadar XVI/25 Karangturi	Gresik
4	Zakaria Wiharto	Laki-Laki			Jl. Usman Sadar Karangturi	Gresik
5	Muhammad Kholili	Laki-Laki			Jl. Usman Sadar XI/27 Sukorame	Gresik
6	Abdul Rahman	Laki-Laki			Jl. Akim Kayat 1/20 Sukorame	Gresik
7	Ahmad Fahmi Maulana	Laki-Laki			Jl. KH. Kholil 04/03 Kebungson	Gresik
8	Ery Dwi Saputra	Laki-Laki			Jl. KH. Kholil 2/17-A Kebungson	Gresik
9	Miftachul Huda	Laki-Laki			Jl. Sindujoyo 19/08 Sukodono	Gresik
10	Choirul Anam	Laki-Laki			Jl. Sindujoyo 17/19 Sukodono	Gresik

* D A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H .



FORM 5.A.3 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA

NO	PELAPOR	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK		NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT KEJADIAN
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	>60 tahun	SEHAT	BERKEBUTUHAN KHUSUS					
JANUARI															
1	Ibu Putri		√				√		√						Jl Tanjung Harapan IV NO. 32 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar
2	Bpk Andika	√					√		√						Perumahan Ganden Palace No.10 Desa Peganden Kecamatan Manyar
3	Bpk Sutekno	√					√		√						Desa Kertosono Rt.06 Rw.03 Kecamatan Sidayu
4	Bpk Zainul	√					√		√						Perumahan Puri Gending Asri Jl Awikoen Madya Blok D No.04 Kelurahan Gending Kecamatan Kebomas
5	Bpk Robin	√					√		√						Jl Raya Hula'an Desa Hula'an Kecamatan Menganti
6	Bpk Afak	√					√		√						Desa Slempit Rt.16 Rw. 09 Kecamatan Kedaeman
7	Ibu Tia		√				√		√						Jl Raya Manyar Desa Sukorejo Kecamatan Manyar
8	Ibu Anna		√				√		√						Perumahan Menganti Permai Blok D7 No.15 Kecamatan Menganti



9	Bpk Abdullah Najib	√					√		√						Perumahan Gresik Kota Baru Jl Sumatera No.46A Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar
10	Bpk Suriadi	√					√		√						Dusun Dalean Desa Guranganyar Kecamatan Cerme

*D
A T A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H A T D I A P L I K



FORM 5.B.1 LAYANAN *RESPONSE TIME* PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT

KABUPATEN/KOTA:

TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja alat komunikasi HT	A. Jumlah komandan lapangan	0	$(A \cdot C) + (B \cdot C)$	0
			B. Jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran	0		
			C. Harga unit per jenis	-		
		2. Kesiapan Sarana Pusdalops Damkar	A. Jumlah rig di pusdalops	0	$(A \cdot D) + (B \cdot D) + (C \cdot D)$	0
			B. Jumlah perangkat komputer	0		
			C. Jumlah sound sistem/sirine toa	0		
			D. Harga unit per jenis	-		
2	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ <i>panic button</i>	1. Nomor tunggal dan aplikasi smartphone	A. Jumlah server	0	$(A \cdot C) + (B \cdot C)$	0
			B. Jumlah Perangkat Komputer	0		
			C. Harga unit per jenis	0		



FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	1. Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah sektor/pos	0	A*B*C	0
			B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar	0		
			C. Harga satu unit	-		
		2. Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	16	A*B*C	333.990.000
B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	1					



			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	20.874.375		
		3. Pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	16	(A*B)*C	327.441.216
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	1.462		
			C. Harga per liter bahan bakar	13.998		
		4. Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	A. Jumlah petugas	5	(A*B)*C	50.000.000
			B. Jumlah pelatihan	1		CSR
			C. Biaya per pelatihan	10.000.000		
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	0	A*B	0
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	-		
		2. Penyediaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat Perlindungan diri petugas	93	A*B	0
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	3.717.946		
3			A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman	0	A*B	0



		1. Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	B. Harga per jumlah/volume	-		
	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah unit tandon air	0	(A*B)*C	0
			B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun	-		
			C. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit	-		
4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	80	A*B	0
			B. honorarium piket jaga	-		
	2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	80	A*B		
		A. honorarium per kejadian kebakaran	-			



FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

KABUPATEN/KOTA:
GRESIK
TAHUN : 2023

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah pos sektor/pos damkar	0	A*B*C	0
			B. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	0		
			C. Harga satu unit	-		
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	3	(A*B)*C	16.200.000
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	3		
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1.800.000		
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	3	(A*B)*C	80.319.600
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1.998		
			C. Harga per liter bahan bakar	13.400		
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan	A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (<i>rescue</i>)	93	A*B	-



		perlengkapan penyelamatan	B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit	-		
3	Kesiapan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Kesiapsiagaan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	87	A*B	8.700.000
			B. Honorarium piket jaga	100.000		
		2. Pelaksanaan penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	87	A*B	8.700.000
			B. Honorarium per kegiatan penyelamatan	100.000		
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas	0	(A*B)*C	0
			B. Jumlah pelatihan	0		
C. Biaya per pelatihan	10.000.000					



FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	A. Frekuensi kegiatan sosialisasi	2	A*B	Rp 51.261.600,00
			B. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi	25.630.800		
		Sosialisasi Lembaga Pendidikan	A. Frekuensi kegiatan sosialisasi	-	A*B	
			B. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi	-		
2	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A. Frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan Penyuluhan	-	A*B	-
			B. Biaya penyelenggaraan per pelatihan/ simulasi dan penyuluhan	-		
3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1. Diklat Pelatihan Dasar	A. Jumlah personil	-	A*B	-
			B. Biaya penyelenggaraan	-		



		2. Diklat Pemadam I	A. Jumlah personil	-	A*B	-
			B. Biaya penyelenggaraan	-		-
		3. Bimbingan Teknis Pemadam Kebakaran (BIMTEK)	A. Jumlah personil	-	A*B	-
			B. Biaya penyelenggaraan	-		-
4	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKI)	1. Pembentukan satuan relawan kebakaran	A. Jumlah satlakar	-	A*B	-
			B. Biaya paket pelatihan/simulasi	-		-
		2. Penyediaan Sarana satlakar dan relawan kebakaran	A. Jumlah satlakar	-	(A*B)*C	-
			B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar	-		-
			C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket	-		-
		3. Pembinaan operasionalisasi satlakar dan relawan kebakaran	A. Jumlah satlakar	-	A*B	-
			B. Biaya per kegiatan satlakar	-		-
		1. Pembentukan satuan relawan kebakaran Perusahaan	A. Jumlah satlakar Perusahaan	-	A*B	-
			B. Biaya paket pelatihan/simulasi	-		-
		2. Penyediaan Sarana satlakar Perusahaan	A. Jumlah satlakar Perusahaan	-	(A*B)*C	-
			B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar Perusahaan	-		
			C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket Perusahaan	-		
			A. Jumlah satlakar Perusahaan	-	A*B	-



		3. Pembinaan operasionalisasi satlakar Perusahaan	B. Biaya per kegiatan satlakar Perusahaan	-		
--	--	---	---	---	--	--



FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN
KABUPATEN/KOTA GRESIK
TAHUN 2023

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A. Jenis tenaga ahli	0	$((A*B*C*D)+(E*F))$	0
			B. Jenis potensi risiko	0		
			C. Jumlah orang	0		
			D. Jumlah bulan kerja	0		
			E. Jumlah pertemuan	0		
			F. Atk dan penggandaan laporan	0		
		2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran	A. Jenis tenaga ahli	0	$((A*B*C)+(D*E))$	0
			B. Jumlah orang	0		
			C. Jumlah bulan kerja	0		
			D. Jumlah pertemuan	0		
			E. Atk dan penggandaan laporan	0		
		3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi	A. Jenis tenaga ahli	0	$((A*B*C)+(D*E))$	0
			B. Jumlah orang	0		
			C. Jumlah bulan kerja	0		



		penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	D. Jumlah pertemuan	0		
			E. Atk dan penggandaan laporan	0		
		4. Diskusi publik terhadap dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	A. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta sound system	0	$((A+B+C)+((D+E)*F+(D+G)*H)+1)$	0
			B. Penyediaan peralatan pendukung (infocus, layar, computer set)	0		
			C. Penggandaan materi/atk/dokumentasi	0		
			D. Akomodasi dan konsumsi	0		
			E. Transport peserta	0		
			F. Jumlah peserta	0		
			G. Honor tenaga ahli	0		
			H. Jumlah tenaga ahli laporan	0		
			I. Laporan	12		
		5. Pelaporan kejadian kebakaran	A. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran	12	$(A*B*C)+D$	0
			B. Jumlah petugas pendataan	0		
			C. Honorarium petugas pendataan	0		
			D. Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan	0		
2	Inspeksi	1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung	100	$(A*B)*C$	Rp -
			B. Jumlah petugas	6		
			C. Biaya per kegiatan	Rp -		
		2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung	75	$(A*B)*C$	Rp 43.875.000,00
			B. Jumlah petugas	6		



			C. Biaya per kegiatan	Rp 97.500,00		
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas Inspeksi	A. Jumlah petugas	0	(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan	0		
			C. Biaya per pelatihan	0		
3	Investigasi pasca kebakaran	1. Inventarisasi kejadian kebakaran	A. Jumlah petugas	0	(A*B)*C	0
			B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung	0		
			C. Biaya kegiatan	0		
		2. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas	0	A*B*C*D	0
			B. Frekuensi investigasi	0		
			C. Jumlah sarana pendukung	0		
	D. Biaya per kegiatan investigasi		0			

FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

KABUPATEN/KOTA: GRESIK

TAHUN: 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSISTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSISTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
1	2	3	4	5	6	7



1	GRESIK	18	4	458	3	540
---	--------	----	---	-----	---	-----



FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : GRESIK TAHUN : 2023

NO.	KABUPATEN/ KOTA	OPERASI NON KEBAKARAN							
		KECELAKAAN TRANSPORTASI	WATER RESCUE	ANIMAL RESCUE	PENYELAMATAN PADA KETINGGIAN	PENYELAMATAN PADA BANGUNAN RUNTUH	PENANGANAN POHON TUMBANG	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	GRESIK	0	0	298	0	0	0	0	27



FORM 5.D.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI) KABUPATEN/KOTA :
TAHUN : 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	GRESIK	99,18	0	49,59



FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (OPERASI NON KEBAKARAN)

KABUPATEN/KOTA : TAHUN :

NO.	KABUPATEN/ KOTA	OPERASI NON KEBAKARAN							
		KECELAKAAN TRANSPORTASI	WATER RESCUE	ANIMAL RESCUE	PENYELAMATAN PADA KETINGGIAN	PENYELAMATAN PADA BANGUNAN RUNTUH	PENANGANAN POHON TUMBANG	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	GRESIK	4	0	363				1	CINCIN = 18; GAS LPG = 2; ANAK TERJEPIT = 1; KUNCI = 3; ROLLING DOOR MACET = 1; ANAK TERKUNCI = 1; SAPI KURBAN MENGAMUK = 1;





7. URUSAN SOSIAL

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS

PROVINSI/KAB/KOTA/KEC/DESA : KAB GRESIK

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUBDGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN/SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRE		LANTRAAN	KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SEORANG TIDAK MENGURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyandang Disabilitas																
1	Muhammad Alvian Ilham Sudipto	3525092102160001	L	21/02/2016	Raci Tengah			##### #####				Disabilitas Sensorik - Tuna Rungu				
2	Syafia Nada Hafivi	3525095709170001	P	17/09/2017	Gedangan			##### #####				Disabilitas Sensorik - Tuna Rungu				



3	Rena Syafiah El-Adhim	3525037110 150001	P	31/10/ 2015	Jl. Slamet		##### #####				Disabilit as Sensori k - Tuna Rungu				
4	Fina Nazilatur Rohmah	3525015703 100001	P	17/03/ 2010	lmaan		##### #####				Disabilit as Sensori k - Tuna Rungu				

*D AT A Y A N G L E B I H D A R I 50 B I S A D I L I H A T D I A P L I K



FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : GRESIK

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA												KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN		
		SHELTER / RUMAH SINGGAH	PUSKESOS	CALL CENTER	KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN	TRC KETELANTARAN	DAPUR UMUM	LD P	MANAJEMEN LOGISTIK	MANAJEMEN SHELTER	KEPOSKODAN	KS B	TRC BENCANA	SANGA T BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial																			
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga		0				0	0	0			0	0	0					
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	1	1	1	1	1	0	0	0	1		0	0	0	√				
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga		0				0	0	0			0	0	0					
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang		0				0	0	0			0	0	0					



	memerlukan layanan di luar panti/lembaga																	
	Total sarana prasarana yang ada	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0					
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan	3	3	3	3	3	0	0	0	3	0	0	0					
Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota																		
1	Estimasi jumlah korban bencana kabupaten/kota	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0					
	Total sarpras yang ada	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	√			
	Jumlah sarpras yang dibutuhkan	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	0				



FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA
TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantrar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasisosial dasar di luar panti. Indikator
			A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis	a. Layanan data dan pengaduan		(a) Honor petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Alat pengelolaan data (komputer, printer); (d) Alat tulis kantor; (e) Sewa jaringan internet.	RUMUS = (a x b) + c + d + e
			B. Standar sarana dan prasarana LKS/ rumah singgah	b. Layanan kedaruratan		(a) Transport petugas; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti; (c) Pemeliharaan kendaraan; (d) Honor petugas tim reaksi cepat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. RUMUS = c + d
			1. Standar SDM				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. RUMUS = b + c + d



			2. Standar sarana dan prasarana			Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. RUMUS = a + d
				c. Penyediaan permakanan		(a) Penerima layanan per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Transport petugas. RUMUS = (a x b x c) + d
				d. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian; (b) Pembelian perlengkapan mandi; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden; (d) Pembelian alas kaki; (e) Transport petugas. RUMUS = a + b + c + d + e
				e. Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda; (b) Kaca mata; (c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; (d) Alat bantu dengar; (e) Kruk; (f) Tripod; (g) Tongkat putih; (h) Reglet (alat tulis untuk tuna netra); (i) Transport petugas; (j) Transport penerima layanan. RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j



			f. Penyediaan perbekalan kesehatan	(a) Obat umum; (b) Timbangan; (c) Pengukur tinggi badan; (d) Termometer; (e) Transport petugas; (f) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + f
			g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	(a) Honor pekerja sosial; (b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Pembelian alat peraga; (d) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d
			h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan i. pengemis dan	(a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c
			j. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
			k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
			l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport penerima layanan; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan	Sesuai dengan standar biaya



						sesudah reunifikasi keluarga.	
				n. Layanan rujukan		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima manfaat.	RUMUS = a + b



FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA								
NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota		RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di wilayah kabupaten/kota. Jumlah LKS/ Rumah Singgah untuk Disabilitas, Anak, Lanjut Usia, Gelandangan Pengemis Data SDM pengelola layanan sosial di luar panti.
			A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan permakanan		(a) Paket pembelian bahan permakanan/ makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanan per orang per hari.	RUMUS = a + b + c *a = d x e x f	Data tenaga penunjang di LKS/ Rumah Singgah (administrasi).
			B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		(a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks sandang per orang per kejadian.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	
			1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun;	RUMUS = a + b + c *a = d x e	



						(e) Indeks tempat penampungan pengungsi.		
			2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanaan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	
				e. Pelayanan dukungan psikosial		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikososial.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	



FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR LUAR PANTI
PROVINSI : JAWATIMUR

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (2023)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA									KONDISI AKHIR TAHUN 2026
									TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Alat bantu dengar, kaki palsu, Kursi Roda Cerebral Palsy, Kursi Roda Kesehatan, Tangan Palsu	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program rehabilitasi sosial	Orang	180.207.500	APBD	32	200.000.000	200.000.000	60	410.000.000	410.000.000	70	500.000.000	500.000.000	



2	Pemberian bimbingan kepada keluarga penyandang disabilitas dan pelatihan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program rehabilitasi sosial	Orang	50.950.000	APBD	75	100.000.000	100.000.000	275	300.000.000	300.000.000	300	350.000.000	350.000.000
3	Layanan Pendidikan dan Keterampilan	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program rehabilitasi sosial	Orang	59.214.000	APBD	10	60.000.000	60.000.000	45	250.000.000	250.000.000	55	325.000.000	325.000.000



FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI
Kabupaten/Kota :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR "TAHUN N + 5"
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Alat bantu dengar, kaki palsu, kursi roda kesehatan, tangan palsu, kursi roda Cerebral Palsy	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial	Orang	Rp 152.887.650	APBD	25	Rp 149.999.850	Rp 149.999.850	29	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	50	Rp 375.000.000	Rp 375.000.000	60	Rp 410.000.000	Rp 410.000.000	70	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

2	Pemberian bimbingan kepada penyandang disabilitas	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial	Orang	Rp 59.999.420	AP BD	14 0	Rp 99.999.800	Rp 99.999.800	75	Rp 71.650.000	Rp 71.650.000	25	Rp 275.000.000	Rp 275.000.000	27	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	30	Rp 350.000.000	Rp 350.000.000	Rp 350.000.000
3	Pemberian layanan pendidikan	Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	Rehabilitasi Sosial	Orang	Rp 94.948.740	AP BD	60	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	25	Rp 59.214.000	Rp 59.214.000	40	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	45	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	55	Rp 325.000.000	Rp 325.000.000	Rp 325.000.000



FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR LUAR PANTI

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SALURAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN + 5
									TAHUN N + 1		TAHUN N + 2		TAHUN N + 3		TAHUN N + 4		TAHUN N + 5							
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1	Pemberian bimbingan fisik mental spritual bagi anak	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial	Orang	Rp 7.697.365.922	APBD	6756	Rp 5.242.334.870	Rp 5.233.4870	6750	Rp 6.404.551.200	Rp 6.404.551.200	750	Rp 8.499.900.000	Rp 8.499.900.000	7600	Rp 8.688.500.000	Rp 8.688.500.000	7600	Rp 9.288.500.000	Rp 9.288.500.000	9.288.500.000
2	Fasilitasi adopsi anak beserta dokumen kependudukan	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial	Orang	Rp 30.429.864	APBD	30	Rp 92.960.000	Rp 92.960.000	50	Rp 78.611.000	Rp 78.611.000	153	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	165	Rp 115.000.000	Rp 115.000.000	175	Rp 125.000.000	Rp 125.000.000	125.000.000





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

2	Layanan rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Orang	Rp 44.99	A	4	Rp 50.00	Rp 50.00	9	Rp 15.15	Rp 151.04	2	Rp 280.00	Rp 280.00	2	Rp 320.00	Rp 320.00	2	Rp 35.00	Rp 350.00	Rp 350.00
							9.800	B		00.00	00.00		46.40	0	7	0	0	8	000.00	00.00	3	00.00	000.00	0



FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA LUAR PANTI

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	S A T U A N	ALOK ASI ANGGARAN (Tahun-n)	S U M B E R D A N A	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KOND ISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									T A R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	T A R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	T A R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	T A R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	T A R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial	Orang	Rp -	APBD	0	Rp -		25	Rp 9.980.000	Rp 9.980.000	45	Rp 65.000.000	Rp 65.000.000	55	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	65	Rp 85.000.000	Rp 85.000.000	Rp 85.000.000



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

2	Layanan Kedaruratan untuk operasional BLBK Cerme	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial	Orang	Rp 124.899.97	A	96	Rp 75.000.00	Rp 75.000.00	1	Rp 90.000.00	Rp 90.000.00	2	Rp 320.000.00	Rp 320.000.00	2	Rp 350.000.00	Rp 350.000.00	30	Rp 385.000.00	Rp 385.000.00	Rp 385.000.00
---	--	-------------------------------	---	--	---------------------	-------	---------------	---	----	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------	----	---------------	---------------	---------------



FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH
Kabupaten/Kota

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	S A T U A N	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	S U M B E R D A N A	TARGET KINERJA PR					OGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISAB					ILTAS TERLAMBAT DALAM PAN					TI DAN KERANGKA			KONDISI AKHIR TAHUN N + 5																										
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5																																
									T A R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	T A R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	T A R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	T A R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	T A R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	T A R G E T	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)																											
1	Kebutuhan permakanaan	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penganganan Bencana	Orang	Rp 49.998.500	APBD	250000000	Rp 100000000	Rp 100000000	123000000	Rp 350000000	Rp 350000000	130000000	Rp 500000000	Rp 500000000	140000000	Rp 650000000	Rp 650000000	150000000	Rp 750000000	Rp 750000000	160000000	Rp 750000000	Rp 750000000	170000000	Rp 750000000	Rp 750000000	180000000	Rp 750000000	Rp 750000000	190000000	Rp 750000000	Rp 750000000	200000000	Rp 750000000	Rp 750000000	210000000	Rp 750000000	Rp 750000000	220000000	Rp 750000000	Rp 750000000	230000000	Rp 750000000	Rp 750000000	240000000	Rp 750000000	Rp 750000000	250000000	Rp 750000000	Rp 750000000
2	Pemulangan Orang Terlantar dan Penanganan Mr. X	Penganganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penganganan Bencana	Orang	Rp 40.000.000	APBD	400000000	Rp 350000000	Rp 350000000	400000000	Rp 335000000	Rp 335000000	450000000	Rp 385000000	Rp 385000000	500000000	Rp 42.500.000	Rp 42.500.000	550000000	Rp 600000000	Rp 600000000	600000000	Rp 600000000	Rp 600000000	650000000	Rp 600000000	Rp 600000000	700000000	Rp 600000000	Rp 600000000	750000000	Rp 600000000	Rp 600000000	800000000	Rp 600000000	Rp 600000000	850000000	Rp 600000000	Rp 600000000	900000000	Rp 600000000	Rp 600000000	950000000	Rp 600000000	Rp 600000000	1000000000	Rp 600000000	Rp 600000000			



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

3	Layanan psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pena ngana Benca na g	0	Rp -	A P B D	0	Rp -	Rp -	5	Rp 13.335.000	Rp 13.335.000	7	Rp 25.000	Rp 25.000	8	Rp 35.000	Rp 35.000	1	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000
---	---------------------	--------------------------------	---	---	-----------------------	---	------	---------	---	------	------	---	---------------	---------------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------



FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DI LUAR PANTI
KABUPATEN KOTA : GRESIK

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	RP	VOLUME	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29	180.207.500	179.617.572	29	100,00	99,67	APBD	-	-
2	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	50.950.000	49.950.000	60	100,00	98,04	APBD	-	-
3	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	59.214.000	53.108.350	25	100,00	89,69	APBD	-	-
4	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	25.355	5.937.359.200	5.676.819.881	24.484	96,56	95,61	APBD	sisa penyaluran bantuan sosial bagi janda miskin dan anak yatim	penyaluran tidak bisa tersalur 100% dikarenakan kondisi yang diluar jangkauan Dinas Sosial



5	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	30	22.266.200	22.266.200	30	100,00	100,00	APBD	-	-
6	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Orang	52	43.532.800	43.532.800	52	100,00	100,00	APBD	-	-
7	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	105	4.767.000	4.767.000	104	99,05	100,00	APBD	-	-
8	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	105	42.183.020	41.692.980	104	99,05	98,84	APBD	-	-
9	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	57	64.310.200	63.869.200	57	100,00	99,31	APBD	-	-
10	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Orang	80	91.000.000	90.916.000	80	100,00	99,91	APBD	-	-
11	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Orang	5.343	50.000.000	50.000.000	5.343	100,00	100,00	APBD	-	-
12	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	31	27.900.000	27.900.000	31	100,00	100,00	APBD	-	-
13	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	Orang	68	13.335.000	13.335.000	68	100,00	100,00	APBD	-	-